



**MODEL INFORMASI AKUNTANSI MUSTAHIK
DALAM PROSES PEMBERDAYAAN
(STUDI KASUS EKPLORATORIS PADA BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL JAKARTA)**

TESIS

oleh

**Dhofir Miftah
NIM 160820301025**

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2020**



**MODEL INFORMASI AKUNTANSI MUSTAHIK
DALAM PROSES PEMBERDAYAAN
(STUDI KASUS EKPLORATORIS PADA BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL JAKARTA)**

TESIS

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S2)
dan mencapai gelar Magister Akuntansi

oleh

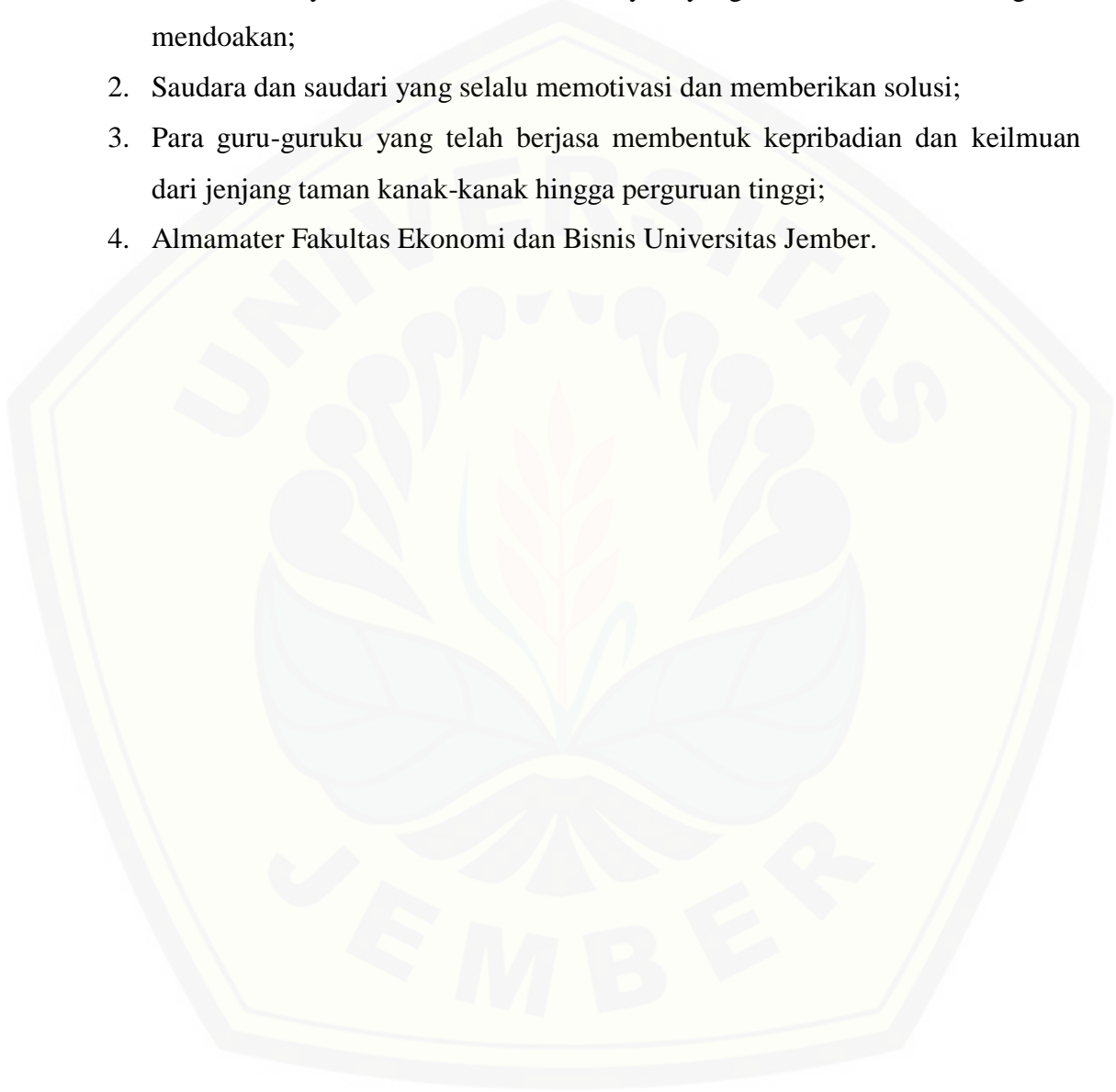
**Dhofir Miftah
NIM 160820301025**

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2020**

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

1. Ummi Ihsaniyah dan Abah Miftah Hasyim yang senantiasa mendukung dan mendoakan;
2. Saudara dan saudari yang selalu memotivasi dan memberikan solusi;
3. Para guru-guruku yang telah berjasa membentuk kepribadian dan keilmuan dari jenjang taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi;
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.



MOTO

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antar kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...”
(terjemahan kutipan Surat Al-Baqarah ayat 282)*



* Departemen Agama Republik Indonesia. 1990. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Surabaya: Penerbit Mahkota.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhofir Miftah

NIM : 160820301025

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Model Informasi Akuntansi Mustahik Dalam Proses Pemberdayaan (Studi Kasus Ekploratoris Pada Badan Amil Zakat Nasional Jakarta)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 8 September 2020

Yang menyatakan,



Dhofir Miftah
NIM. 160820301025

HALAMAN PEMBIMBINGAN

TESIS

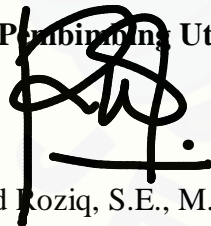
**MODEL INFORMASI AKUNTANSI MUSTAHIK
DALAM PROSES PEMBERDAYAAN
(STUDI KASUS EKPLORATORIS PADA BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL JAKARTA)**

oleh

**Dhofir Miftah
NIM 160820301025**

Pembimbing

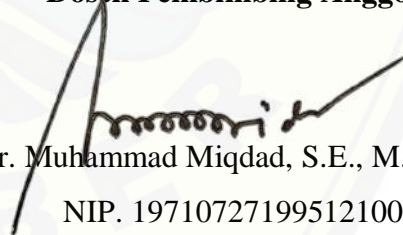
Dosen Pembimbing Utama



Dr. Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak.

NIP. 197004281997021001

Dosen Pembimbing Anggota



Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.

NIP. 197107271995121001

PENGESAHAN

Tesis berjudul “Model Informasi Akuntansi Mustahik Dalam Proses Pemberdayaan (Studi Kasus Eksploratoris Pada Badan Amil Zakat Nasional Jakarta)” karya Dhofir Miftah telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 8 September 2020


Tempat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jember

Tim Penguji,

Ketua,


Dr. Alwan Sri Kustono, M.Si., Ak.
NIP. 197204162001121001

Anggota,


Digitally signed by Wahyu Agus Winarno
DN: cn=D, ou=Faculty of Economics and Business, o=University of Jember, cn=Wahyu Agus Winarno, email=wahyuaw@unej.ac.id
Date: 2020.11.13 18:45:05 +0700

Dr. Wahyu Agus Winarno, S.E., M.Sc., Ak. NIP. 198308102006041001

Anggota,




Dr. Whedy Prasetyo, S.E., MSA., Ak. NIP. 197705232008011012

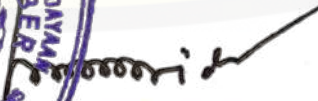

Mengetahui/Menyetujui:

Koordinator Program Studi Magister Akuntansi,




Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si., Ak.
NIP. 196608051992012001

Mengesahkan,
Dean Fakultas Ekonomi dan Bisnis,



Dr. Muhammad Muzdad, S.E., M.M., Ak., CA.
NIP. 197107271995121001

RINGKASAN

Model Informasi Akuntansi Mustahik Dalam Proses Pemberdayaan (Studi Kasus Ekploratoris Pada Badan Amil Zakat Nasional Jakarta); Dhofir Miftah, 160820301025; 2020; 71 halaman; Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Kemiskinan hingga saat ini masih menjadi salah satu masalah rutin yang harus diselesaikan oleh pemerintah khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Lembaga Amil Zakat ikut berperan dengan pendistribusian dana zakatnya membantu masyarakat miskin lebih cepat keluar dari kondisi kemiskinan. Hal ini berdasarkan pada penelitian yang disebutkan oleh Mintarti bahwa waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari garis kemiskinan adalah sekitar 7 tahun jika tanpa kehadiran zakat sedangkan dengan distribusi zakat, waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari garis kemiskinan menjadi 5,1 tahun. Namun, permasalahan penanggulangan kemiskinan tidak hanya sebatas pada pemberian akses jasa keuangan, tapi juga dalam hal pemberdayaan. Masyarakat miskin harus dibantu dan didampingi dalam pengelolaan keuangan sehingga dapat menggunakannya dengan maksimal. Salah satu bentuk pendampingan dalam pemberdayaan adalah dengan penambahan wawasan untuk meningkatkan kemampuan perencanaan keuangan masyarakat miskin.

Penelitian ini dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional Pusat yang berlokasi di Jl. Matraman Raya No 134, RT.5/RW.4 DKI Jakarta. Pendistribusian dana ZIS di BAZNAS secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pendistribusian yang bersifat karitatif (konsumtif) dan pendistribusian yang bersifat produktif. Dalam pendistribusian yang bersifat produktif BAZNAS juga melakukan pendampingan kepada para mustahik yang diberdayakan. Salah satu cara pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS adalah pendampingan dengan memanfaatkan informasi akuntansi mustahik. Hal ini karena informasi akuntansi merupakan basis utama dalam perencanaan keuangan dan juga akuntabilitas.

Masyarakat yang diberdayakan perlu diberi pemahaman secukupnya tentang akuntabilitas dan perencanaan keuangan dengan metode yang sesederhana mungkin. Hal ini bisa dimulai dengan memberikan mereka pengetahuan mengenai akuntansi dan bagaimana praktiknya secara sederhana agar tingkat literasi keuangan mereka bertambah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case study*) dengan tujuan eksploratif. Pendekatan studi kasus eksploratif digunakan karena dalam penelitian ini dilatarbelakangi keingintahuan peneliti tentang model informasi akuntansi yang diterapkan dalam proses pemberdayaan dan sejauh pengetahuan peneliti belum ada penelitian yang membahas proses pemberdayaan yang menggunakan informasi akuntansi yang baik. Informan ditentukan dengan cara *purposefully selected participants* yaitu dengan memilih informan yang akan diwawancarai sesuai dengan tingkat pengetahuannya terhadap objek penelitian.

Hasil penelitian ini adalah sebuah model informasi akuntansi yang didasarkan pada solusi atas beberapa permasalahan yang terjadi terkait pelaporan keuangan mustahik. Permasalahan dan solusinya adalah sebagai berikut: 1) mustahik yang tidak memahami tentang penjurnalan *double entry*; solusi untuk masalah ini adalah menyusun format isian informasi akuntansi yang lebih familiar bagi mustahik, yakni *single entry* namun esensinya tetap akan memperhatikan prinsip *double entry*. 2) Tidak adanya laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan (laba rugi) atau laporan keuangan tidak lengkap; solusi untuk masalah ini dibuatkan lembar dengan format kolom laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. 3) Tidak adanya pengakuan unsur-unsur laporan keuangan yang dibutuhkan; solusi dari masalah ini adalah melihat kegiatan transaksi bisnis dalam lingkungan usaha dan menyediakan akun yang dibutuhkan. 4) Tidak digunakannya asumsi dasar berupa dasar akrual; solusi dari masalah ini adalah menyediakan akun yang menyajikan informasi berdasar asumsi dasar akrual. 5) Penyajian laporan keuangan tidak wajar; solusi dari masalah ini adalah melengkapi hal yang dibutuhkan dalam pelaporan sesuai dengan ketentuan

laporan keuangan minimum. Oleh karena itu peneliti telah mendesain model informasi akuntansi yang mudah untuk diterapkan oleh para mustahik namun mampu menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Pentingnya pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar (dalam hal ini adalah SAK EMKM) adalah manfaat yang akan dirasakan oleh para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.



PRAKATA

Segala puji hanya untuk Allah SWT yang telah menganugerahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Model Informasi Akuntansi Mustahik Dalam Proses Pemberdayaan (Studi Kasus Ekploratoris Pada Badan Amil Zakat Nasional Jakarta)”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata dua (S2) pada Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dr. Muhammad Miqdad S.E., M.M., Ak. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan tesis ini;
2. Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
3. Ummi, abah, kakak dan istri tercinta yang senantiasa mendukung dan mendoakan;
4. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini. Akhirnya penulis berharap, semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Jember, September 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Zakat Produktif	10
2.2 Akuntabilitas Pengembangan Dana ZIS	12
2.3 Informasi Akuntansi	14
2.4 Kualitas Informasi Akuntansi	19
2.5 Pemberdayaan Masyarakat Miskin	23
2.6 Penelitian Terdahulu	27
BAB 3. METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Pendekatan Penelitian	30
3.3 Lokasi Penelitian.....	31
3.4 Jenis dan Sumber Data	32
3.4.1 Jenis Data	32
3.4.2 Sumber Data	32
3.5 Teknik Penentuan Informan.....	33
3.6 Teknik Pengumpulan Data	33
3.6.1 Observasi	34
3.6.2 Wawancara	34
3.6.3 Dokumen	35
3.7 Teknik Analisis Data.....	36
3.8 Pengujian Keabsahan Data	37
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Gambaran Umum BAZNAS	39
4.1.1 Struktur Organisasi BAZNAS	39
4.1.2 Visi Dan Misi BAZNAS	40

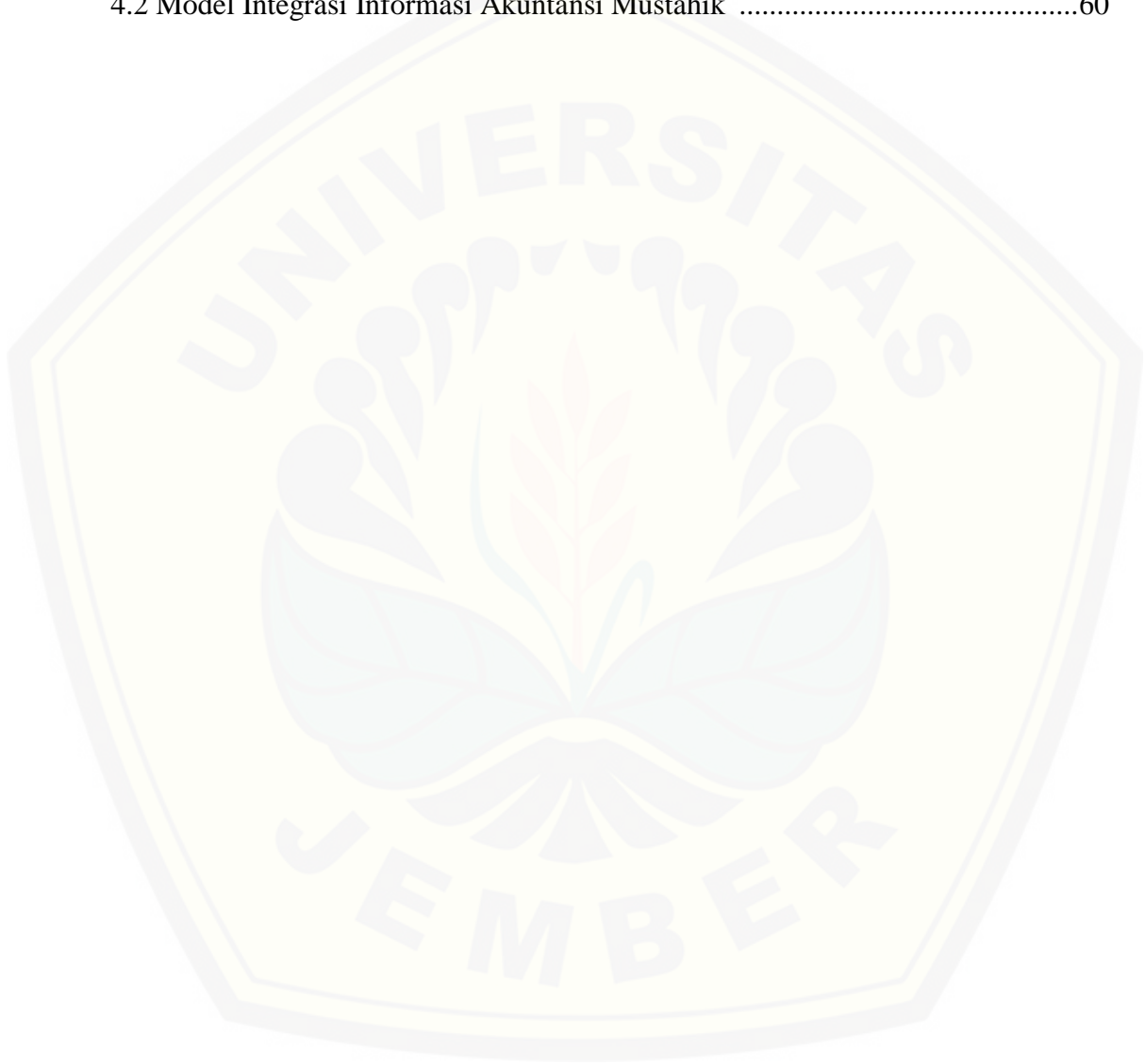
4.2 Program Pemberdayaan Di BAZNAS	41
4.2.1 Alur Teknis Pemberdayaan Di BAZNAS	41
4.2.2 Pendampingan Dalam Pemberdayaan	43
4.2.3 Informasi Akuntansi Mustahik	44
4.3 Informasi Akuntansi Mustahik Dalam Proses Pemberdayaan.....	45
4.3.1 Pemberdayaan Dan Pendampingan	46
4.3.2 Analisa Model Informasi Akuntansi Berjalan	48
4.3.3 Model Informasi Akuntansi Diusulkan	50
4.3.3.1 Desain Model Informasi Pencatatan Transaksi	54
4.3.3.2 Desain Model Integrasi Pelaporan.....	59
4.3.3.3 Penyajian Laporan	65
BAB 5. PENUTUP	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Implikasi Penelitian	70
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	70
5.4 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Jumlah Penduduk Miskin Indonesia	1
2.1 Tahapan Pemberdayaan dengan Pendekatan Afektif, Kognitif, Psikomotorik dan Konatif	25
2.2 Bentuk Treatment Dalam Tahap Pemberdayaan	26
4.1 Format Laporan Mingguan Mustahik	45
4.2 Model Informasi Akuntansi Mustahik (Berjalan)	50
4.3 Contoh Laporan Posisi Keuangan	52
4.4 Contoh Laporan Laba Rugi	53
4.5 Contoh Catatan atas Laporan Keuangan	54
4.6 Kas Masuk Penghasilan	56
4.7 Kas Masuk Utang dan Ekuitas	56
4.8 Penjualan Aset Tetap	56
4.9 Kas Masuk Tarik Bank	57
4.10 Kas Masuk Tagih Piutang	57
4.11 Pembelian Persediaan	57
4.12 Beban-beban	58
4.13 Pembelian Aset Tetap	58
4.14 Kas Keluar Menabung	58
4.15 Piutang Usaha	59
4.16 Kas Keluar Prive	59
4.17 Kas Keluar Bayar Utang	59
4.18 Gabungan Kas	61
4.19 Gabungan Bank	61
4.20 Gabungan Piutang	62
4.21 Rincian Piutang	62
4.22 Rincian Persediaan	63
4.23 Gabungan Aset Tetap	63
4.24 Rincian Aset Tetap	64
4.25 Gabungan Utang Usaha	65
4.26 Gabungan Saldo Laba	65
4.27 Laporan Posisi Keuangan	66
4.28 Laporan Laba Rugi	67
4.29 Catatan atas Laporan Keuangan	67

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Proses Alokasi Modal	18
4.1 Laporan Omzet Mingguan Mustahik	49
4.2 Model Integrasi Informasi Akuntansi Mustahik	60



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan hingga saat ini masih menjadi salah satu masalah rutin yang harus diselesaikan oleh pemerintah khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terlihat adanya penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia meskipun tidak signifikan. Tabel 1 berikut ini menampilkan data jumlah penduduk miskin Indonesia dari tahun 2012 – 2018 (dalam ribuan):

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Miskin Indonesia

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Perkotaan	10.634,47	10.356,69	10.619,86	10.485,64	10.272,55	10 131.28
Pedesaan	17.919,46	17.371,09	17.893,71	17.278,68	15.310,44	15 543.31
Jumlah	28.553,93	27.727,78	28.513,57	27.764,32	26.582,99	25 674.59

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Penanggulangan kemiskinan di Indonesia dilakukan oleh berbagai elemen dalam pemerintahan dari pusat hingga daerah. Program yang dijalankan pun ada berbagai bentuk, ada program yang berbasis bantuan sosial, ada yang berbasis pemberdayaan masyarakat, dan ada yang berbasis pemberdayaan usaha kecil. Namun dalam rangka penanggulangan masalah kemiskinan ini pemerintah tidak bergerak sendirian. Ada banyak pihak yang ikut berpartisipasi dalam aktivitas penanggulangan kemiskinan di Indonesia, baik pihak tersebut bersinergi langsung dengan pemerintah atau tidak, baik berupa individual, kelompok atau berbentuk lembaga.

Pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas penanggulangan kemiskinan selain pemerintah, ada yang berlatar belakang sosial (non-profit) dan ada pula yang berlatar belakang komersil. Lembaga yang berlatar belakang sosial seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan lembaga *crowdfunding*. Sedangkan lembaga yang berlatar belakang komersil seperti lembaga keuangan yang memberikan akses keuangan yang mudah untuk usaha mikro. Masing-masing lembaga tersebut memiliki peran dalam penanggulangan kemiskinan. Lembaga Amil Zakat dengan pendistribusian dana zakatnya mampu membantu masyarakat miskin lebih cepat

keluar dari kondisi kemiskinan. Hal ini berdasarkan pada penelitian yang disebutkan oleh Mintarti dalam Beik (2013:9) bahwa waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari garis kemiskinan adalah sekitar 7 tahun jika tanpa kehadiran zakat sedangkan dengan distribusi zakat, waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari garis kemiskinan menjadi 5,1 tahun. Lembaga keuangan juga memiliki peran dalam penanggulangan kemiskinan dengan pengembangan keuangan baik dari sisi akses keuangan pada masyarakat miskin ataupun dari sisi *financial deepening*. Rewilak (2017:170) mengatakan bahwa banyak penelitian yang menguji dampak akses keuangan dan *financial deepening* terhadap pengurangan angka kemiskinan, meskipun dampak akses keuangan jauh lebih kecil daripada *financial deepening*. Di antara penelitian yang menjadi acuan pernyataannya itu adalah penelitian oleh Burgees dan Pande yang dilakukan di India.

Hambatan untuk mendapatkan akses keuangan antara lain karena adanya prasyarat harga dan non harga yang tidak bisa dipenuhi oleh masyarakat miskin. Prasyarat harga misalnya konsumen harus melakukan setoran awal minimal dalam nominal tertentu untuk membuka rekening padahal tidak semua orang bisa memenuhi prasyarat demikian. Prasyarat non harga adalah persyaratan administratif yang membuat konsumen merasa kesulitan untuk memenuhinya (Steelyana, 2013:97). Maka alternatif yang bisa diambil oleh masyarakat adalah mengakses pembiayaan melalui lembaga keuangan non bank seperti lembaga keuangan mikro dimana hambatan akses pembiayaan tidak serumit di bank, bahkan lebih mudah lagi untuk mendapatkan akses pendanaan dari lembaga amil zakat.

Permasalahan penanggulangan kemiskinan tidak hanya sebatas pada pemberian akses jasa keuangan, tapi juga dalam hal pemberdayaan. Masyarakat miskin harus dibantu dan didampingi dalam pengelolaan keuangan sehingga dapat menggunakannya dengan maksimal. Salah satu bentuk pendampingan dalam pemberdayaan adalah dengan penambahan wawasan untuk meningkatkan kemampuan perencanaan keuangan masyarakat miskin. Perencanaan keuangan berarti persiapan yang hati-hati mengenai kebutuhan dan tujuan keuangan di masa

mendatang dan menentukan strategi untuk mencapai tujuan yang ditentukan (Bertisch, 1994:14).

Kompleksitas permasalahan kemiskinan menyebabkan kebutuhan kepada solusi pemecahnya juga semakin bermacam-macam. Maka masing-masing pihak yang terlibat dalam aktivitas penanggulangan kemiskinan akan melaksanakan tindakan yang berbeda tergantung pada fokus masalah yang menjadi perhatiannya dalam penanggulangan kemiskinan. Salah satu lembaga yang bergerak dalam penanggulangan kemiskinan adalah yang menjadi objek penelitian ini. Penelitian ini dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional Pusat yang berlokasi di Jl. Matraman Raya No 134, RT.5/RW.4 DKI Jakarta.

Salah satu instrumen dalam ajaran agama Islam dalam meminimalisir tingkat kemiskinan adalah penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Penyaluran dana tersebut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif saja, namun juga untuk membantu meningkatkan kemandirian umat dalam perekonomian. Hikmah adanya penyaluran dana zakat antara lain adalah meningkatkan kesejahteraan orang-orang tidak mampu dan orang-orang yang membutuhkan (az-Zuhaili, 1985:732) dengan demikian maka motifasi dalam pendistribusian zakat bukan hanya memenuhi kebutuhan konsumtif mustahik semata namun juga mampu mengangkat tingkat kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, dana zakat yang berhasil dihimpun oleh lembaga amil zakat tidak disalurkan dalam bentuk pendistribusian konsumtif saja namun juga dalam bentuk produktif. Terdapat riwayat yang senada dengan pendistribusian zakat produktif ini, yaitu bahwa rasulullah pernah memberikan dana sedekah (zakat) kepada Umar bin Khatthab dan rasulullah memerintahkan untuk mengembangkannya atau mersedekahkannya kembali kepada orang lain (as-Shan'ani, 2009:82). Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberian dana sedekah (zakat) untuk diproduktifkan berbeda dengan pemberian dana tersebut untuk kebutuhan konsumtif. Dalam pemberian dana zakat untuk tujuan produktif ada ketentuan bahwa penerima harus mengembangkannya sehingga penerima dana tersebut sudah tidak lagi membutuhkan dana bantuan untuk kebutuhan konsumtif. Hal ini senada dengan ketentuan pada pasal 27 dalam UU No 23 tahun 2011 bahwa

pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Landasan hukum wajibnya zakat dalam al-Qur'an dan bahwa perlu adanya keterlibatan lembaga legal yang melaksanakan penghimpunannya terdapat dalam surah at-Taubah [9] : 103. Allah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah [9] : 103)

Badan Amil Zakat Nasional skala nasional yang dibentuk oleh pemerintah, bersifat mandiri dan bertanggung(BAZNAS) merupakan lembaga non-struktural yang berfungsi untuk pengelolaan zakat dan bertanggung jawab pada presiden melalui menteri. Berdasar pada UU. No 23 tahun 2011 dapat diambil kesimpulan bahwa Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yakni Badan Amil Zakat Nasional, Unit Pengumpul Zakat, dan Lembaga Amil Zakat. Pada pasal 27 dalam UU No 23 tahun 2011 dinyatakan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Pendistribusian dana ZIS di BAZNAS secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pendistribusian yang bersifat karitatif (konsumtif) dan pendistribusian yang bersifat produktif. Pendistribusian yang bersifat produktif diistilahkan juga dengan pendayagunaan. Dalam pendistribusian yang bersifat produktif BAZNAS juga melakukan pendampingan kepada para mustahik yang diberdayakan untuk memastikan bahwa dana yang didistribusikan benar-benar didayagunakan dengan maksimal sehingga tujuan untuk memberdayakan mustahik tercapai. 67% dari

mustahik yang mendapatkan zakat produktif menyatakan bahwa pola pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS cukup baik (Pratama, 2015:101)

Lembaga pengelola dana ZIS perlu melakukan pendampingan atau pertemuan secara langsung dengan para mustahik supaya kendala dan manfaat dari penyaluran dana ZIS dapat diketahui sehingga ada umpan balik dan solusi untuk pemecahan masalah terkait penyaluran dana ZIS (Yulinartati, 2013:401). Pendampingan yang ditujukan untuk memaksimalkan penggunaan dana ZIS seharusnya juga mampu memberikan wawasan perencanaan keuangan kepada masyarakat miskin. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah adanya pendampingan dengan memanfaatkan informasi akuntansi. Hal ini karena informasi akuntansi merupakan basis utama dalam pengambilan keputusan ekonomis. Laporan akuntansi yang disajikan oleh mustahik akan menjadi dasar evaluasi oleh BAZNAS dan menjadi dasar perencanaan keuangan bagi mustahik. Dengan akuntansi mustahik bisa membuat perencanaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang, membuat proposal usaha, menghitung *Break Event Point*, menghitung margin dan menentukan harga, membuat pencatatan usaha, dan menuliskan arus kas masuk dan keluar. Untuk melakukan pendampingan dengan pendidikan perencanaan keuangan dan pengawasannya dibutuhkan usaha yang ekstra dari BAZNAS dan kedisiplinan para masyarakat (anggota pemberdayaan/mustahik). Karena selain aset keuangan yang dimiliki mayoritas anggota tersebut sedikit, mereka pun memiliki tingkat literasi keuangan yang rendah. Hal ini berdasar pada hasil penelitian bahwa tingkat literasi keuangan seseorang berbanding lurus dengan strategi perencanaan keuangan (Sobaya, *et al.*, 2016:126). Maka anggota perlu diberi pemahaman secukupnya dan dengan metode yang sesederhana mungkin. Hal ini bisa dimulai dengan memberikan mereka pengetahuan mengenai akuntansi dan bagaimana praktiknya secara sederhana.

Bentuk usaha atau bisnis yang dilakukan oleh anggota pemberdayaan BAZNAS kebanyakan memiliki tingkat modal yang sangat rendah. Bahkan jika bisa membuat istilah baru untuk kategori usaha masyarakat miskin ini maka kategori selayaknya bagi usaha mereka adalah usaha super mikro. Hal ini karena

kondisi aset bersih mereka jauh dari angka maksimal kekayaan bersih yang menjadi kategori usaha mikro, yaitu Rp 50.000.000 dan omzet pertahun maksimal Rp 300.000.000. Dengan kondisi yang sangat minim modal ini, maka para masyarakat miskin akan kesulitan untuk mendapatkan akses keuangan bahkan dari lembaga keuangan mikro yang berorientasi pada pengembangan usaha. Kehadiran BAZNAS di sini menjadi oase bagi masyarakat ekonomi bawah yang ingin menjalankan usaha “super mikro”-nya, karena BAZNAS berorientasi pada pemberdayaan bukan hanya pada pengembangan usaha masyarakat ekonomi bawah. Hambatan lainnya yang dialami oleh masyarakat miskin untuk mendapatkan akses keuangan adalah syarat administrasi seperti laporan keuangan yang tidak familiar dalam praktik usaha mereka. Dalam masalah ini pun BAZNAS menjadi tempat yang sesuai bagi masyarakat yang tidak memiliki laporan keuangan dalam usahanya. Namun demikian, masyarakat miskin perlu diajarkan memahami dan menggunakan akuntansi untuk peningkatan literasi keuangan demi kemajuan tingkat perekonomian mereka. Karena tingkat literasi keuangan seseorang berbanding lurus dengan strategi perencanaan keuangan (Sobaya, *et al.*, 2016:126).

Usaha yang dilakukan masyarakat miskin adalah usaha dalam kategori usaha mikro (UMi), maka tentu akuntansi yang akan diterapkan adalah akuntansi yang tidak rumit dan memiliki manfaat sesuai dengan ruang lingkup usaha tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ediraras (2010:155) dikatakan bahwa setidaknya ada sembilan manfaat akuntansi dan laporan keuangan untuk UKM, yaitu: 1) penilaian kinerja usaha dan sebagai bahan evaluasi untuk masa yang akan datang, 2) menjadi dasar pertimbangan pembelian bahan baku untuk produksi dan alat-alat produksi, 3) keputusan mengenai harga (harga jual, diskon, menaikkan harga, dll), 4) mengajukan permohonan pembiayaan kepada lembaga keuangan, 5) untuk pengembangan usaha, 6) penambahan dan pengembangan sumber daya manusia, meningkatkan penghasilan karyawan, dan pemberian bonus pada karyawan, 7) penyusunan anggaran untuk periode berikutnya, 8) penambahan aset usaha, dan 9) promosi usaha.

Hasil wawancara awal dengan Bapak Sugianto (karyawan BAZNAS pusat), peneliti mendapatkan informasi bahwa BAZNAS dalam proses pemberdayaan ekonomi mustahik juga menerapkan pendampingan dan memanfaatkan informasi akuntansi. Bimbingan dan penerapan akuntansi yang dilakukan kepada masyarakat miskin (mustahik) adalah dalam rangka meningkatkan kualitas informasi akuntansi. Akuntansi yang digunakan dalam kegiatan pemberdayaan ini adalah bentuk akuntansi untuk laporan keuangan dengan tujuan khusus (*special purposes financial statement*) karena lingkup penggunaannya tidak mempertimbangkan keputusan pihak eksternal yang signifikan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang disajikan sebelumnya maka dapat dinyatakan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana model informasi akuntansi mustahik yang berjalan dalam proses pemberdayaan mustahik produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Jakarta?
- b. Bagaimana model informasi akuntansi mustahik yang baik untuk diterapkan dalam proses pemberdayaan mustahik produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisa model informasi akuntansi mustahik yang berjalan dalam proses pemberdayaan mustahik produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Jakarta.

- b. Untuk mendesain model informasi akuntansi mustahik yang baik untuk diterapkan dalam proses pemberdayaan mustahik produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Jakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada berbagai pihak sebagaimana berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi dalam disiplin ilmu akuntansi dari sisi teoritis untuk pengembangan keilmuan akuntansi serta bisa dimanfaatkan sebagai rujukan untuk penelitian berikutnya khususnya mengenai manfaat akuntansi untuk pemberdayaan masyarakat miskin.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi Badan/Lembaga Amil Zakat

Hasil dari penelitian secara praktis diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Badan/Lembaga Amil Zakat sehingga semakin banyak yang dapat berpartisipasi dalam pendistribusian dana ZIS kepada masyarakat ekonomi kelas bawah dengan ikut berperanserta dalam pemberdayaan dan meminimalisir hambatan terhadap akses keuangan bagi mereka.

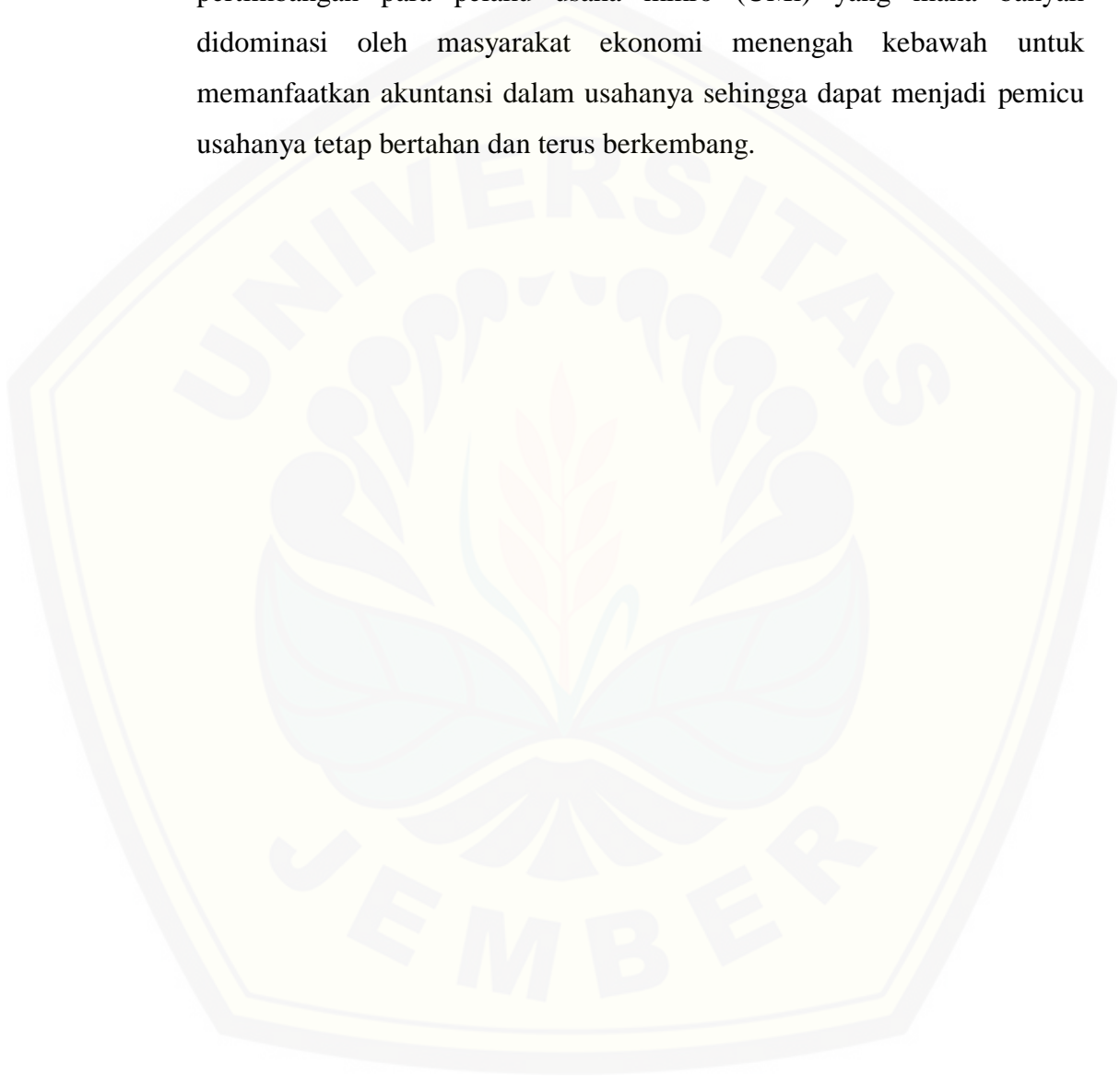
- b. Manfaat bagi aktivis pemberdayaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan acuan bagi para aktivis pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dari berbagai latar belakang dan berbagai orientasi dengan memanfaatkan akuntansi dalam proses pemberdayaan. Semakin banyak pihak yang ikut berpartisipasi dalam memperkaya wawasan masyarakat miskin terhadap perencanaan

keuangan diharapkan dapat memperluas dampak penanggulangan kemiskinan khususnya di Indonesia.

c. Manfaat bagi pengusaha UMi

Hasil dari penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan pertimbangan para pelaku usaha mikro (UMi) yang mana banyak didominasi oleh masyarakat ekonomi menengah kebawah untuk memanfaatkan akuntansi dalam usahanya sehingga dapat menjadi pemicu usahanya tetap bertahan dan terus berkembang.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Zakat Produktif

Zakat adalah nama bagi harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dengan cara tertentu dan didistribusikan kepada golongan tertentu (Ibnu Qosim, 2018:29). Landasan hukum wajibnya zakat dalam al-Qur'an dan bahwa perlu adanya keterlibatan lembaga legal yang melaksanakan penghimpunannya terdapat dalam surah at-Taubah [9] : 103. Allah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah [9] : 103)

Zakat didistribusikan kepada delapan golongan sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur'an surah at-Taubah [9] : 60. Allah berfirman:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Mahabijaksana” (QS. At-Taubah [9] : 60).

Di Indonesia, dua dari delapan golongan yang disebut dalam ayat tersebut sering kali disebut secara bersamaan sehingga mengesankan keduanya merupakan golongan yang sama, yakni fakir dan miskin. Padahal keduanya memiliki perbedaan dalam pandangan syariah. Hal ini diperjelas dengan definisi keduanya yang dituliskan oleh Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari bahwa fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki penghasilan yang layak yang bisa menutupi kebutuhannya dan kebutuhan keluarga yang ditanggungnya. Sedangkan miskin adalah orang yang mampu memiliki harta atau penghasilan yang bisa menutupi kebutuhannya namun tidak mencukupi, seperti kebutuhannya memerlukan sepuluh namun ia hanya memiliki delapan (al-Malibari, 2018: 75-76).

Hikmah adanya penyaluran dana zakat antara lain adalah meningkatkan kesejahteraan orang-orang tidak mampu dan orang-orang yang membutuhkan (az-Zuhaili, 1985:732) dengan demikian maka motifasi dalam pendistribusian zakat bukan hanya memenuhi kebutuhan konsumtif mustahik semata namun juga mampu mengangkat tingkat kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, dana zakat yang berhasil dihimpun oleh lembaga amil zakat tidak disalurkan dalam bentuk pendistribusian konsumtif saja namun juga dalam bentuk produktif. Terdapat riwayat yang senada dengan pendistribusian zakat produktif ini, yaitu bahwa rasulullah pernah memberikan dana sedekah (zakat) kepada Umar bin Khaththab dan rasulullah memerintahkan untuk mengembangkannya atau mensesdekahkannya kembali kepada orang lain (as-Shan'ani, 2009:82).

عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء , فيقول : أعطه أفقر مني , فيقول : خذه فتمّوله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت

غير مسرف ولا سائل فخذه و ما لا فلا تتبعه نفسك (رواه مسلم)

Diriwayatkan dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya: “Sesungguhnya rasulullah pernah memberi suatu pemberian kepada Umar, kemudian Umar berkata: “Berikanlah kepada orang yang lebih membutuhkan daripada aku”, rasulullah menjawab: “Ambillah dan kembangkanlah atau

sedekahkanlah. Apabila kau mendapatkan harta semacam ini sedangkan engkau bukanlah orang yang boros dan bukanlah peminta-minta, maka ambillah. Tetapi bila kamu tidak demikian maka janganlah kamu gantungkan nafsumu padanya". (HR. Muslim)

Ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan hadits Salim bin Abdillah tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa kejadian pemberian harta oleh rasulullah kepada Umar tersebut adalah terkait harta baitul mal yang memang diperuntukkan sedekah dan sebagian yang lain berpendapat bahwa harta tersebut adalah berkaitan dengan harta hak pemberian pemimpin. Apabila status harta tersebut dikaitkan dengan harta sedekah maka dalam hal ini Umar merasa dirinya tidak layak menerima sedekah sehingga ia menolak dan menganjurkan agar diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Padahal orang yang berkecukupan juga boleh menerima pemberian harta sedekah apabila telah memenuhi syarat, yaitu ia tidak memintanya dan dalam hatinya tidak ada keinginan terhadap harta tersebut. Dalam kejadian tersebut rasulullah menilai Umar adalah sosok yang telah memenuhi kriteria, maka rasulullah memerintahkan Umar supaya tetap menerima harta pemberian tersebut untuk kemudian dikembangkan dan kemudian disedekahkan. Sedangkan jika harta tersebut dikaitkan dengan harta hak pemberian pemimpin, maka Umar menduga bahwa harta itu adalah harta sedekah sehingga ia merasa tidak layak menerimanya (al-Asqallani, 1986:396). Dari keterangan tersebut dapat diambil simpulan bahwa zakat produktif diberikan kepada pihak-pihak yang kebutuhan pokoknya telah terpenuhi.

2.2 Akuntabilitas Pengembangan Dana ZIS

Akuntabilitas mulai dikenal sejak 2000 SM, yaitu sejak sejarah Babilonia dengan adanya hukum Hammurabi yang mewajibkan raja untuk melakukan pertanggungjawaban atas tindakannya kepada pihak yang memberi wewenang (Velayutham dan Perera, 2004:53). Akuntabilitas bermula dari keinginan untuk memenuhi permintaan atau kewajiban untuk memberikan justifikasi atas aktivitas yang dilakukan seseorang terhadap orang lain sebagai jawabannya (Gray *et al.*

1997:334). Akuntabilitas dalam perspektif agama Islam dilihat dalam konteks yang lebih luas yakni tidak sebatas tanggungjawab kepada manusia saja tetapi juga kepada Allah SWT. Adanya ikatan rasa persaudaraan antara umat Islam adalah salah satu gambaran bahwa tanggungjawab itu memiliki posisi penting dalam Islam. Akuntabilitas tertinggi dalam Islam adalah akuntabilitas setiap individu kepada Allah dan akuntabilitas ini sangat penting untuk memastikan bahwa hubungan akuntabilitas yang lain juga terpenuhi. Hubungan dengan Allah diperhitungkan melalui *hisab*. Kata *hisab* mencerminkan sebuah “akun” yang mengandung makna universal terkait kewajiban individu untuk bertanggungjawab kepada Allah dan sesama manusia. Dalam hal ini, setiap muslim memiliki “akun” di sisi Allah yang mencatat setiap perbuatan baik dan buruk manusia sampai mati. Dan Allah akan memberikan “akun” tersebut kepada manusia pada hari penghakiman (Saad, *et al.*, 2014:512).

Dalam konteks penyaluran dana Zakat Infaq dan Sedekah, akuntabilitas BAZNAS ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) direpresentasikan dalam laporan keuangan dan laporan program kegiatan yang dikomunikasikan kepada para *muzakki* atau donatur. Akuntabilitas BAZNAS atau LAZ dibutuhkan karena mereka merupakan lembaga mediasi antara muzakki dan mustahik sebagaimana diatur dalam PSAK 109. Kemudian dalam konteks penyaluran dana ZIS produktif, akuntabilitas mustahik produktif direpresentasikan dalam laporan keuangan yang dilaporkan kepada BAZNAS ataupun LAZ. Akuntabilitas mustahik dibutuhkan untuk justifikasi atas aktivitas produktif yang dilakukan mustahik yang telah menerima dana ZIS produktif. Hal ini sebagai bentuk implementasi dari pesan rasulullah kepada Umar bin Khatthab, yakni sebagai justifikasi atau pertanggungjawaban bahwa sebagai penerima dana produktif bukanlah orang yang *musrif* (boros / mengonsumsi sesuatu berlebihan) sebagaimana riwayat dari Salim bin Abdillah bahwa rasul memberi catatan bolehnya menerima dana zakat tersebut bagi orang yang tidak boros dan tidak meminta-minta (as-Shan’ani, 2009:82).

2.3 Informasi Akuntansi

Dalam sejarah akuntansi secara umum dipelopori oleh Luca Pacioli, di mana ia dalam tulisannya *Summa de Arithmetica, Geometria, Proportione et Proportionalite* mendeskripsikan sebuah sistem untuk memastikan bahwa informasi keuangan telah dicatat dengan akurat dan efisien. Perkembangan bentuk pelaporan keuangan semakin diperhatikan sejalan dengan perkembangan bentuk-bentuk perusahaan/bisnis, tujuannya antara lain adalah untuk memisahkan kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan dan untuk memastikan bahwa pengelola perusahaan melakukan aktivitas yang sesuai dengan kebijakan pemilik perusahaan (Weygandt, *et al.*, 1995:5-6).

Sesungguhnya penemu *double entry book keeping system* bukanlah Luca Pacioli karena sistem semacam itu sudah lumrah digunakan sejak adanya perdagangan antara Venice dan Genoa awal abad ke-13 M pasca terbukanya jalur perdagangan antara Timur Tengah dan Kawasan Mediterania. Tidak hanya itu, Bendahara kota Massri pada tahun 1340 sudah menggunakan *double entry* dalam pembukuannya. Berdasarkan pendapat Paragallo bahwa pelopor *double entry* pertama kali adalah seorang pedagang yang bernama Benedetto Cotrugli dalam buku *Della Mercatua e del Mercate Perfetto* pada tahun 1458 namun baru diterbitkan pada 1573. Bahkan, sangat terbuka lebar kemungkinan bahwa ada peranan pedagang muslim terhadap pertukaran informasi terkait sistem akuntansi mengingat bahwa peradaban sosial budaya Arab saat itu sudah sangat maju dan tercatat telah memiliki beberapa ahli yang sumbangsuhnya kepada dunia ilmu pengetahuan sangat besar seperti Aljabr, Alkhawarizmi dan Ibnu Khaldun. Ilmuwan Eropa yang tertarik belajar ke Arab adalah Leonardo Fibonacci da Pisa yang kemudian mengenalkan angka Arab dan aljabar atau metode perhitungan ke benua Eropa pada tahun 1202 melalui buku yang berjudul "*Liber Abacci*" serta mempopulerkan angka Arab ke dalam kehidupan sehari-hari termasuk ke dalam kegiatan ekonomi dan transaksi perdagangan (Nurhayati, 2017: 80-81).

Akuntansi dalam sudut pandang agama Islam adalah sebuah sarana atau alat (*tool*) untuk menjalankan perintah Allah SWT dalam al-Qur'an pada surah *al-Baqarah* ayat ke 282 (Nurhayati, 2017: 78)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُكُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب

بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ... الآية

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antar kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...” (QS. Al-Baqarah [2] : 282).

Dalam perkembangan akuntansi muncul perbedaan pendapat mengenai definisi akuntansi. Salah satu penyebab munculnya perbedaan adalah kecenderungan definisi di satu sisi mengarahkan akuntansi sebagai seperangkat pengetahuan (*body of knowledge*) dan di sisi yang lain mengarahkan pada fungsi (*function*). Namun dari dua perbedaan tersebut terdapat dua kata kunci yang penting, yaitu perekayasaan (*engineering*) dan cara tertentu (*in a certain manner*). Peran akuntansi akan terasa nyata apabila informasi yang diberikan mampu mampu mengendalikan perilaku pihak pengambil keputusan ekonomik dalam mencapai suatu tujuan sosial dan ekonomik (Suwardjono, 2014:15).

Dalam perkembangan teori akuntansi tercatat bahwa kecenderungan sejak tahun 1930-an hingga 1970-an adalah mengarah pada akuntansi normatif (*normative accounting theory*), yaitu kecenderungan kajian bagaimana seharusnya akuntansi berjalan bukan mengenai mengapa hal itu terjadi. Teori normatif mengarahkan penjelasan terkait informasi apa yang seharusnya dikomunikasikan dan bagaimana informasi itu disajikan (*what ought to be*). Pada pertengahan tahun 60-an muncul gagasan yang mempertanyakan relevansi teori normatif tersebut yaitu pandangan lain yang dikenal dengan teori akuntansi positif (*positive accounting theory*). Teori akuntansi positif berfokus pada kemampuan untuk memprediksi dan menjelaskan praktik-praktik akuntansi (Miqdad, 2012:149).

Di dalam disiplin akuntansi terdapat istilah pembukuan (*bookkeeping*) yang kebanyakan orang memiliki pemahaman yang salah terhadap hal ini dengan menganggapnya satu bentuk dan sama dengan akuntansi (*accounting*). Padahal

pembukuan hanya salah satu bagian dari akuntansi yaitu proses pencatatan kejadian ekonomis, sedangkan dalam akuntansi selain pencatatan ada proses lainnya yaitu identifikasi dan komunikasi (Weygandt, *et al.*, 1995:6). Perbedaan lain antara pembukuan dan akuntansi adalah dalam penggunaan sistem pencatatan. Pembukuan menggunakan sistem pencatatan sederhana yaitu dengan *single entry*, sedangkan akuntansi menggunakan *double entry* dan *triple entry*. Sistem pencatatan *single entry* melakukan pencatatan transaksi satu kali, transaksi yang menyebabkan bertambahnya kas akan dicatat di bagian penerimaan sedangkan yang menyebabkan berkurangnya kas akan dicatat di bagian pengeluaran. (Erlina, *et al.*, 2015:4).

Secara garis besar akuntansi diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu akuntansi manajerial dan akuntansi keuangan. Akuntansi manajerial (*managerial accounting*) merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, menganalisa, dan mengomunikasikan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi operasi perusahaan. Sedangkan akuntansi keuangan (*financial accounting*) merupakan sebuah proses yang puncaknya adalah penyusunan laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak internal dan eksternal (Kieso, *et al.*, 2017:4). Karakteristik yang akan selalu ada dalam proses akuntansi tersebut adalah identifikasi, pengukuran dan komunikasi informasi keuangan tentang entitas ekonomi kepada pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan akan menggunakan informasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu Warren *et al.* (2017:3) menyatakan bahwa penyediaan laporan keuangan akan selalu melalui proses sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi siapa saja pemangku kepentingan
- b. Menilai apa yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan
- c. Merancang sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan
- d. Mencatat data mengenai aktivitas dan peristiwa ekonomi dalam perusahaan
- e. Menyiapkan laporan akuntansi bagi para pemangku kepentingan.

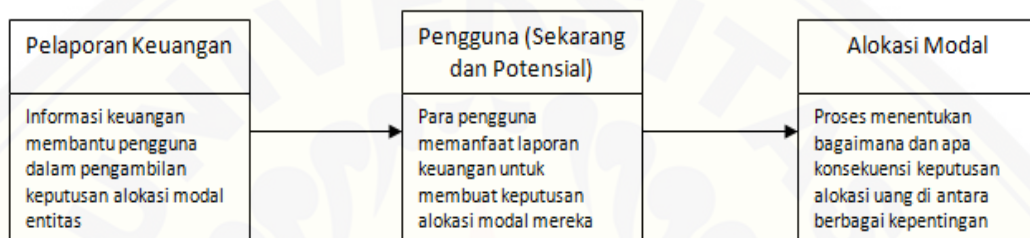
Dengan mengidentifikasi siapa saja yang akan menggunakan laporan keuangan dan informasi apa saja yang dibutuhkan oleh mereka maka laporan keuangan disusun sesuai dengan hasil identifikasi tersebut. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar yang berlaku merupakan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purposes financial statement*), sedangkan laporan keuangan yang disusun tanpa harus mengikuti standar yang berlaku misalkan hanya mengikuti aturan spesifik dari regulator atau sesuai dengan kebutuhan khusus pemakainya adalah laporan keuangan dengan tujuan khusus (*special purposes financial statement*). Karakteristik informasi yang dihasilkan oleh akuntansi bergantung kepada lingkungan tempat akuntansi itu diterapkan, maka akuntansi sebagai seperangkat pengetahuan akan membahas berbagai konsep dan alternatif serta dampaknya dalam berbagai kondisi lingkungan. Konsep yang dipilih untuk diterapkan dalam lingkungan tertentu akan menjadi suatu model akuntansi untuk mencapai tujuan sosial tertentu (Suwardjono, 2014:10).

Secara umum laporan keuangan memiliki tujuan sebagai berikut (Martani, *et al.*, 2017:9):

- a. Memberikan informasi terkait posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan entitas yang dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi
- b. Memberikan gambaran mengenai hal-hal yang telah dilakukan oleh manajemen dan pertanggungjawaban yang dipercayakan kepadanya
- c. Memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar penggunanya
- d. Menyediakan informasi tentang pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu.

Manfaat akuntansi dalam bentuk laporan keuangan untuk dasar pengambilan keputusan salah satunya adalah dalam alokasi modal. Perencanaan alokasi modal dilandaskan pada keberadaan sumber daya yang terbatas, sehingga pemilik atau pengelola sumber daya harus berusaha untuk menjaga sumber daya tersebut dan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien. Peran akuntan di sini adalah mengukur kinerja dengan akurat dan wajar secara teratur dan menyajikan informasi terkait hal tersebut, sehingga para manajer dan

perusahaan yang tepat mampu menarik modal investasi. Informasi keuangan relevan yang secara jujur mencerminkan hasil keuangan memungkinkan investor dan kreditor untuk membandingkan laba rugi dan aset yang digunakan oleh beberapa entitas atau perusahaan. Oleh karena para pengguna laporan keuangan tersebut dapat menilai imbal hasil dan risiko relatif terkait dengan peluang investasi, maka mereka dapat menyalurkan sumber daya secara lebih efektif (Kieso, *et al.*, 2017:5). Gambar 2.1 berikut ini mengilustrasikan bagaimana proses kerja alokasi modal.



Gambar 2.1. Proses Alokasi Modal

Proses pengambilan keputusan alokasi modal termasuk kegiatan perencanaan keuangan. Hal ini karena proses alokasi modal bersesuaian dengan definisi mengenai perencanaan keuangan. Bertisch (1994:14) menyatakan: *“Financial Planning can be defined as the careful preparation and coordination of plans necessary to prepare for future financial needs and goals. It is not investment analysis. It involves mapping strategies to achieve your defined goals”*. Bertisch mendefinisikan perencanaan keuangan sebagai persiapan yang hati-hati dan koordinasi dari beberapa rencana mengenai persiapan kebutuhan dan tujuan keuangan di masa mendatang, bukan analisis investasi, tapi menentukan strategi untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Perencanaan keuangan dalam skala terkecil yaitu keuangan pribadi, dalam hal ini Schuchardt, *et al.*, (2007:67) menyatakan: *“Personal finance encompasses tools such as financial statements, checking and savings accounts, debt instruments, mortgages and investment vehicles. It also includes techniques related to cash flow management; risk assessment and management; and planning of taxes, retirement, and estate planning”*. Keuangan pribadi meliputi alat seperti laporan keuangan, rekening tabungan dan deposito, instrumen hutang, hipotik dan sarana investasi, termasuk

juga tekniknya seperti manajemen arus kas, penilaian dan manajemen risiko, perencanaan pajak, pensiun, dan perencanaan aset tetap.

Perencanaan keuangan dapat dibantu dengan adanya laporan keuangan, namun perlu diseimbangi dengan adanya pengetahuan tentang keuangan (literasi keuangan). Menurut Hogarth seseorang dapat dikatakan memiliki pengetahuan tentang keuangan apabila paham mengenai: (a) uang, kredit, investasi, bank, asuransi, dan pajak; (b) konsep dasar manajemen keuangan (seperti risiko, rugi, dan untung); (c) mampu menggunakan pemahamannya itu untuk merencanakan dan membuat keputusan keuangan yang baik (Hira, 2009:6). Menurut OJK literasi keuangan adalah tingkat pengetahuan, keterampilan dan keyakinan masyarakat terkait lembaga keuangan serta produk dan jasanya, yang dituangkan dalam parameter atau ukuran indeks. Indeks ini penting untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat mengenai fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna produk dan jasa keuangan (Sobaya, *et al.*, 2016:116). Namun pada SNLKI 2017 dalam kata pengantarnya OJK menyatakan bahwa literasi keuangan tidak lagi hanya terbatas pada pengertian pengetahuan, keterampilan dan keyakinan akan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan, namun sikap dan perilaku pun dapat memberikan pengaruh yang meningkatkan literasi keuangan. Sikap dan perilaku keuangan yang bijak dapat dilihat dari kemampuan seseorang menentukan tujuan keuangan, menyusun perencanaan keuangan, mengelola keuangan dan mampu mengambil keputusan keuangan yang berkualitas dalam menggunakan produk dan jasa layanan keuangan (OJK, 2017:2).

2.4 Kualitas Informasi Akuntansi

Dalam penelitian Delone dan Mclean mengindikasikan bahwa kualitas informasi itu harus berguna, memadai, bisa dibaca, jelas dan unik. Informasi akuntansi bisa saja berguna dalam kasus tertentu tapi tidak berguna dalam kasus yang lain, tergantung pada tipe penggunaannya masing-masing karena kualitas informasi adalah mengenai hal tepat guna (Tam, *et al.*, 2019:1001-103). Informasi

akuntansi yang bisa bermanfaat dalam sistem manajemen haruslah memenuhi empat karakteristik, yaitu: kejelasan (*intelligibility*), relevan (*relevance*), bisa dipercaya (*credibility*), dan kesesuaian (*compatibility*) (Feies, *et al.*, 2013:712). Sama pentingnya dengan peran sebagai perekam historis kejadian ekonomi adalah kemampuan informasi akuntansi untuk menghitung rencana, mensimulasikan alternatif yang dilakukan sepanjang masa, dan mengarahkan keputusan yang semakin baik (Huefner dan Largay, 2008:247). Informasi akuntansi yang berkualitas tidak hanya dibutuhkan dalam kerangka akuntabilitas bisnis yang berorientasi pada profit, tapi juga pada pembiayaan yang bersifat sosial (*non-repayable financing*). Informasi akuntansi yang dibutuhkan dalam rangka pengamanan pembiayaan dari lembaga keuangan adalah yang mampu menyediakan informasi mengenai solvabilitas dan profitabilitas dari proyek yang mengajukan pembiayaan. Maka informasi yang diterima harus bermanfaat dan memiliki nilai yang nyata untuk kontrol, perencanaan dan keputusan investasi. Demikian pula dalam pembiayaan sosial, harus membuktikan profitabilitas proyek dan dampaknya dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada yang berhak (*beneficiaries*) (Feies, *et al.*, 2013:714).

Akuntabilitas dalam pembiayaan sosial dapat diterapkan dalam proses pemberdayaan melalui usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pemberdayaan UMKM sebagaimana termaktub dalam UU No.20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah memiliki tujuan: 1) mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan, 2) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, dan 3) meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Hal ini telah difasilitasi oleh IAI sebagai organisasi profesi yang menaungi akuntan di Indonesia dengan diterbitkannya SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah) yang lebih sederhana dibandingkan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2018. Menjadi suatu tantangan tersendiri untuk mengenalkan dan

membiasakan pencatatan keuangan yang standar kepada para pelaku UMKM, karena persepsi yang ada pada kebanyakan pelaku UMKM bahwa melakukan pencatatan akuntansi adalah perkara yang rumit dan walaupun tanpa pencatatan usaha tetap akan ada penghasilan. Meskipun ada pelaku UMKM yang melakukan pencatatan tapi hanya terbatas pada pendapatan yang masuk dan beban operasional yang dibayar, sehingga data yang dijadikan acuan penentuan keuntungan hanya nilai selisih pendapatan dan beban operasional tunai (Narsa, *et al.*, 2012:213). Melihat hasil penelitian di Ho Chi Minh City setidaknya ada dua alasan mengapa UKM di sana 37,81% mendapatkan laba, 56,49% menderita kerugian, dan sisanya mengalami titik impas (berdasarkan survey ekonomi tahun 2017) adalah: pertama, kebanyakan pelaku usaha fokus hanya pada laba dan tidak memberikan perhatian yang cukup pada kualitas informasi akuntansi yang ada dalam laporan keuangan. Kedua, pelaku usaha tidak familiar bagaimana cara memastikan kualitas informasi akuntansi selama usaha mereka (Tam, *et al.*, 2019:1000)

Informasi akuntansi dapat mengurangi konflik yang ditimbulkan oleh ketidakpastian dampak bisnis antara pihak yang bermitra. Alasan utamanya adalah bahwa informasi akuntansi yang baik memungkinkan mitra untuk bersama-sama menemukan kesepakatan yang optimal. Alasan berikutnya lebih bersifat perilaku, yaitu bahwa informasi akuntansi yang baik dapat mendukung perilaku integratif yang ditandai dengan adanya kerjasama dan pemecahana masalah bersama. Informasi akuntansi yang baik tidak dapat digunakan untuk mengurangi ketidakpastian secara langsung, namun diharapkan dapat merangsang taktik negosiasi kerjasama untuk mengidentifikasi pertukaran (*tradeoff*) yang bisa meminimalisir dampak buruk dari ketidakpastian sehingga dapat menyebabkan keuntungan bersama yang lebih besar (Essa, *et al.*, 2018:21).

Untuk memastikan bahwa laporan keuangan mampu memberikan informasi yang berguna dalam proses pengambilan keputusan maka perlu dipastikan kualitas informasi dari akuntansi keuangan tersebut. Kieso *et al.* (2017:55) menjelaskan karakteristik kualitatif yang diidentifikasi oleh IASB bahwa karakteristik kualitatif dapat berupa karakteristik medasar (pokok) atau

karakteristik yang meningkatkan kualitas. Kualitas dasar dalam informasi akuntansi adalah relevansi dan penyajian yang jujur. Relevansi (*relevant*) menunjukkan bahwa informasi akuntansi mampu membuat perbedaan dalam keputusan, yaitu ketika informasi akuntansi memiliki nilai prediktif (*predictive value*), nilai konfirmasi(*confirmatory*), dan materialitas (*materiality*). Informasi akuntansi dinilai memiliki nilai prediktif apabila mampu menjadi nilai input dalam proses prediksi oleh investor untuk membentuk harapan sendiri. Jika informasi akuntansi itu juga mampu untuk memastikan atau memperbaiki harapan berdasarkan evaluasi sebelumnya, maka ia memiliki nilai konfirmasi. Dan informasi akuntansi dianggap material jika mengabaikan atau salah menyatakan sehingga mempengaruhi dalam pembuatan keputusan. Secara singkat, informasi akuntansi harus mampu membuat perbedaan dalam proses pengambilan keputusan atau lebih baik tidak perlu diungkapkan. Informasi akuntansi disajikan secara jujur (*faithful representation*) berarti angka-angka dan penjelasan yang ditampilkan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Penyajian dinilai jujur jika informasi di dalamnya lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan yang material. Kelengkapan (*completeness*) informasi akuntansi dinilai dengan tersedianya semua informasi yang dibutuhkan sehingga mampu menghindarkan dari kesalahan dalam pengambilan keputusan. Netralitas (*neutrality*) informasi akuntansi berarti informasi yang disajikan bukan untuk menguntungkan pihak kelompok tertentu yang berkepentingan atas pihak yang lain. Dan informasi akuntansi dinyatakan bebas dari kesalahan (*free from error*) berarti angka yang disajikan benar-benar akurat. Hal ini bukan berarti ia terbebas total dari kesalahan karena sebagian besar pengukuran dalam laporan menggunakan perkiraan manajemen, misalnya estimasi masa ekonomis aset tetap.

Karakter yang meningkatkan kualitas informasi akuntansi menjadi pelengkap dari karkater kualitas dasar. Karakteristik yang membedakan laporan keuangan yang lebih berguna dibanding yang kurang berguna. Peningkatan kualitas ditunjukkan dengan dapat dibandingkan, dapat diverifikasi, tepat waktu, dan dapat dipahami. Dapat dibandingkan (*comparability*) berarti informasi yang diukur dan disajikan menggunakan cara yang sama dengan entitas yang sebanding

sehingga pengguna dapat mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dalam peristiwa ekonomi antar entitas. Komparabilitas ini tidak selalu diartikan perbandingan antar entitas, tapi juga untuk peristiwa ekonomi yang sama dalam periode yang berbeda. Hal ini menunjukkan konsistensi perlakuan akuntansi untuk peristiwa yang serupa. Dapat diverifikasi (*verifiability*) berarti informasi akuntansi yang disajikan dapat diukur oleh pengukur independen yang berbeda menggunakan metode yang sama dan mendapatkan hasil yang sama. Tepat waktu (*timeliness*) berarti informasi akuntansi tersebut tersedia bagi pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuannya untuk memengaruhi keputusan. Dan dapat dipahami (*understandability*) adalah kualitas informasi akuntansi yang mampu membantu pengguna yang cukup mendapat informasi untuk melihat signifikansinya. Hal ini dapat ditingkatkan ketika informasi tersebut diklasifikasikan, dicirikan, dan dilaporkan dengan jelas dan ringkas.

2.5 Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Dalam istilah ulama klasik miskin dan fakir dinilai berdasarkan kemampuan memenuhi kebutuhan, jika tidak memiliki harta atau penghasilan layak yang bisa menutupi kebutuhan hariannya maka ia tergolong fakir sedangkan apabila masih memiliki harta dan penghasilan namun tidak mencukupi kebutuhannya maka ia tergolong miskin (al-Malibari, 2018 : 75-76). Dalam pandangan peneliti sosial ekonomi kemiskinan dipandang dari beberapa sudut pandang dan di sini terjadi perbedaan pandangan dan perdebatan terkait pada fokusnya. Pertama penekanan pada ukuran kemiskinan, pandangan ini diusung oleh ahli ekonomi (*measurers*). Kedua penekanan pada konteks keadilan secara lebih luas untuk memahami sebab dan konsekuensi yang ditimbulkannya, pandangan ini diusung oleh ahli sosial (*explainers*) yang cenderung menggunakan *multidimensional approach*. Pendekatan dengan penekanan pada ukuran pada praktiknya menggunakan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need approach*), hal ini biasa diterapkan oleh lembaga internasional atau pemerintah

seperti World Bank dan Biro Pusat Statistik (BPS). BPS memandang kemiskinan sebagai kondisi masyarakat yang hanya bisa memenuhi makanannya kurang dari 2.100 kalori per kapita per hari (Hermawati, 2017 : 270-271).

Pengentasan kemiskinan membutuhkan tindakan yang bervariasi menyesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi. Pemberdayaan merupakan salah satu paradigma baru yang menawarkan solusi atas permasalahan kemiskinan dengan memberikan hak untuk mengelola sumber daya dalam rangka melaksanakan pengembangan. Pemberdayaan ditilik dari sisi etimologi berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Konsep pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris yaitu “*empower*” yang artinya memberi kuasa/wewenang. Konsep ini berkembang sejak tahun 1980-an dan digunakan oleh agen-agen pembangunan hingga sekarang. Oleh karena itu istilah pemberdayaan sangat familiar dikalangan agen pembangunan masyarakat, terutama untuk masalah pengentasan kemiskinan (Tampubolon *et al.*, 2006:11).

Pemberdayaan menurut Sumodiningrat dalam Kurniawati (2013:10) harus direalisasikan dengan melalui tiga jalur, yaitu: (a) Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang (*enabling*), (b) Memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*), dan (c) Memberikan perlindungan (*protecting*). Sedangkan menurut Winami dalam Sulistiyani (2004:79) inti dari pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu: (a) pengembangan (*enabling*), (b) memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan (c) terciptanya kemandirian. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pemberdayaan tidak terbatas pada masyarakat yang sama sekali tidak memiliki daya, tapi juga pada masyarakat yang memiliki daya tapi masih ada keterbatasan. Bahkan pemberdayaan dibedakan dari sumbangan (*charity*) karena dalam pemberdayaan diharuskan ada pendampingan berupa pengawasan dan perlindungan untuk memastikan tercapainya kemandirian masyarakat. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi dimana masyarakat telah mampu untuk memikirkan, memutuskan dan melakukan yang dipandang tepat untuk mencapai pemecahan masalah dengan menggunakan kemampuan

kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik-material (Sulistiyani, 2004:80).

Pemberdayaan perlu dilakukan dalam beberapa tahap. Sulistiyani (2004:82-86) menjelaskan beberapa tahap yang perlu dilalui dalam proses pemberdayaan, yaitu:

- a. Tahapan afektif. Tahapan kesadaran dan pembentukan perilaku peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- b. Tahapan kognitif. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- c. Tahapan psikomotorik dan konatif. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Penjelasan mengenai tahapan pemberdayaan tersebut dapat dilihat dalam taksonomi yang disajikan dalam tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Tahapan Pemberdayaan dengan Pendekatan Afektif, Kognitif, Psikomotorik dan Konatif

Tahap Afektif	Tahap Kognitif	Tahap Psikomotorik	Tahap Konatif
Belum merasa sadar dan peduli	Belum memiliki wawasan pengetahuan	Belum memiliki keterampilan dasar	Tidak berperilaku membangun
Tumbuh rasa sadar & peduli	Menguasai pengetahuan dasar	Menguasai keterampilan dasar	Bersedia terlibat dalam pembangunan
Memupuk semangat kesadaran & kepedulian	Mengembangkan pengetahuan dasar	Mengembangkan keterampilan dasar	Berinisiatif untuk mengambil peran dalam pembangunan
Merasa membutuhkan kemandirian	Mendalami pengetahuan pada tingkat yang lebih tinggi	Memperkaya variasi keterampilan	Berposisi secara mandiri untuk membangun diri dan lingkungan

Sumber: (Sulistiyani, 2004:84)

Tabel 2.1 hanya menjelaskan tentang kondisi masyarakat pada tahap pemberdayaan. Dalam tabel tersebut tidak dijelaskan kondisi dari objek pemberdayaan dan tindakan apa yang perlu dilakukan untuk menanggulangnya. Karena pemberdayaan perlu melihat permasalahan secara holistik, sehingga

penyelesaiannya perlu mempertimbangkan segala aspek yang dinilai perlu diberi tindakan khusus. Aspek dimaksud adalah kondisi afektif, kognitif dan psikomotorik dari individu atau kelompok yang akan diberdayakan. Tabel 2.2 berikut ini menyajikan kondisi afektif, kognitif, psikomotorik dan konatif sekaligus dengan treatment yang diperlukan.

Tabel 2.2 Bentuk Treatment Dalam Tahap Pemberdayaan

Afektif		Kognitif		Psikomotorik		Konatif	
Sangat rendah	Penyuluhan untuk penyadaran	Tidak berpengetahuan	Pembelajaran untuk membuka wawasan	Unskilled	Pelatihan keterampilan dasar	Perilaku acuh tak acuh	Keteladanan perilaku pemerintah & agen pembaharu
Rendah	Mobilisasi pada program	Pengetahuan rendah	Pembelajaran untuk peningkatan	Semi-skilled	Pelatihan lanjutan	Bersedia ikut serta	Motivasi menjadi obyek
Cukup	Motivasi untuk berperan	Cukup	Pilot project	Skilled	Percobaan/ uji coba	Inisiatif untuk berperan	Pilihan-pilihan peran utama
Relatif Tinggi	Supporting Program	Relatif Tinggi	Peluang pemikiran inovatif	Sangat terampil	Peluang berkarya inovatif	Berperan mandiri	Perilaku fasilitasi

Sumber: (Sulistiyani, 2004:86)

Salah satu teknis pemberdayaan adalah pemberdayaan melalui pendekatan kelompok. Salah satu program pemberdayaan masyarakat miskin yang telah dilakukan oleh kementerian sosial dengan pendekatan kelompok adalah program KUBE (Kelompok Usaha Bersama). Departemen Sosial menjelaskan bahwa ada beberapa landasan filosofis yang menjadi dasar pelaksanaan KUBE dalam pemberdayaan masyarakat miskin (Tampubolon, *et al.*, 2006:13), yaitu:

- a. KUBE adalah suatu komunitas atau kelompok yang terdiri dari orang-orang yang masuk dalam kategori kurang mampu
- b. Latar belakang para anggota KUBE tidak selalu sama dan cenderung berbeda-beda dan penuh dengan keterbatasan
- c. KUBE merupakan wadah sebagai sarana kerja sama
- d. KUBE dapat menjadi sarana *sharing* modal dalam rangka membantu pengembangan usaha ekonomis produktif

- e. KUBE merupakan sarana untuk melakukan pengembangan usaha ekonomis produktif
- f. Landasan dalam kegiatan KUBE adalah semangat “dari, oleh dan untuk semua”
- g. Semangat dalam pelaksanaan KUBE menjadi pendorong para anggotanya secara terus menerus sehingga mampu mandiri tanpa selalu tergantung kepada orang lain, dan
- h. Munculnya fungsi sosial antar anggota dalam perkumpulan KUBE.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan judul Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional) oleh Yoghi Citra Pratama (2015) bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran distribusi zakat produktif dan pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat kurang mampu dengan dijadikan modal usaha yang umumnya berskala kecil dan tidak mendapatkan akses keuangan dari lembaga keuangan bank. Penelitian ini dalam pengolahan data menggunakan sejumlah alat analisa, yaitu: *headcount ratio*, *poverty gap ratio* dan *income gap ratio*, *indeks Sen*, dan *indeks Foster Greer and Thorbecke (FGT Index)*. Hasil dari penelitian ini menyajikan informasi bahwa 67% dari mustahik yang diberdayakan menyatakan bahwa pola pendampingan berjalan cukup baik. Berdasarkan *headcount ratio* bahwa rasio jumlah orang miskin sebelum dibagikan zakat adalah 0,8 dan setelah dibagikan zakat mengalami penurunan menjadi 0,55. Artinya ada persentase jumlah orang miskin yang semula 80% menjadi 55%. Indeks kedalaman kemiskinan dengan instrumen *povertygap ratio* (rasio kesenjangan kemiskinan) menunjukkan penurunan dari Rp 547.843 menjadi Rp 210.020, begitu pula dengan menggunakan *income-gap ratio* (rasio kesenjangan pendapatan) menunjukkan penurunan dari 0,44 menjadi 0,17. Indeks keparahan kemiskinan dengan Sen Index menunjukkan penurunan dari 0,50 menjadi 0,24, begitu pula dengan indeks FGT mengalami penurunan dari 0,27 menjadi 0,10.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Yoghi Citra Pratama tersebut adalah ranah penelitiannya berupa pemberdayaan yang dilakukan terhadap kelompok masyarakat miskin yang dilakukan oleh BAZNAS pusat di Jakarta melalui distribusi zakat produktif. Namun memiliki berbeda dalam hal fokus objek penelitian, yaitu bahwa dalam penelitian ini lebih fokus kepada informasi akuntansi mustahik dalam proses pemberdayaan.

Penelitian dengan judul *Micro-Finance and Women Empowerment* oleh Kamal Kanti Das (2016) dilatarbelakangi dengan adanya peran lembaga keuangan mikro di India terhadap reduksi kemiskinan bagi nasabahnya. Trend pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro belakangan ini menjadikan kalangan perempuan sebagai sasaran. Berdasarkan pada *Human Development Report* (2005) terdapat lebih dari 105 juta nasabah peminjam kredit mikro pada tahun 2010 di negara-negara berkembang, 80% penerimanya adalah perempuan dan 70% hidup pedesaan. Penelitian tersebut bertujuan untuk menilai dampak keuangan mikro terhadap pemberdayaan perempuan dan untuk menilai dampak perempuan dalam pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Penelitian tersebut menggunakan data sekunder dalam rentang tahun 2006 - 2008 antara lain dari laporan tahunan SIRD (*State Institute of Rural Development*), NABARD (*National Bank for Agriculture and Rural Development*), juga jurnal dan manual yang diterbitkan oleh lembaga pemerintahan atau swasta dan semacamnya. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa terdapat hubungan yang linear antara peningkatan *Self-Help Groups* (SHG) dengan peningkatan pembiayaan di bank dan jumlah SHG terbanyak ada di daerah Assam. Dari total 5695 SHG hanya 56,9% yang mendapatkan dana bergulir dan hanya 34,52% yang mendapatkan subsidi. Kesimpulannya bahwa munculnya SHG sebagai inovasi dari keuangan mikro memiliki peran yang patut dipuji dalam pemberdayaan perempuan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Kamal Kanti Das tersebut adalah ranah penelitiannya berupa pemberdayaan yang dilakukan terhadap kelompok masyarakat miskin. Namun berbeda dalam beberapa hal, yaitu: 1) penelitian ini dilakukan berdasarkan pada data primer dan sekunder, 2) lembaga yang terkait dengan penelitian ini bukan lembaga keuangan tetapi organisasi

pengelola dana ZIS, dan 3) penelitian ini berfokus kepada model informasi akuntansi dalam proses pemberdayaan.

Penelitian dengan judul *Traditional Market Accounting: Management or Financial Accounting?* oleh Wiyarni (2017) memiliki tujuan untuk menelusuri wilayah akuntansi yang diterapkan pada pasar tradisional apakah termasuk wilayah akuntansi keuangan atau akuntansi manjerial. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan natural (*naturalistic approach*) dengan observasi langsung dan mewawancarai beberapa pedagang di tiga pasar tradisional di Malang, yaitu: pasar tradisional Blimbing, pasar tradisional Bantur, dan pasar tradisional Gedangan. Temuan penelitian tersebut adalah bahwa akuntansi yang diterapkan oleh para pedagang di pasar tradisional lebih cenderung ke wilayah akuntansi manajemen. Dari empat informan yang diwawancarai tidak semua yang membuat catatan keuangan. Informan yang menjawab membuat catatan keuangan semuanya menyatakan bahwa mereka tidak membuat catatan keuangan untuk pengguna eksternal, oleh karena itu catatan itu mereka buat untuk dasar pengambilan keputusan. Catatan yang dilakukan oleh para pedagang di pasar tradisional antara lain catatan hutang pada pemasok dan piutang pada pelanggan, jumlah pesanan, dan harga jual barang. Adanya pedagang yang tidak melakukan pencatatan keuangan karena transaksi di pasar tradisional tidak terlalu rumit dan mereka tidak ingin terlalu terbebani. Para pedagang juga memiliki hubungan yang dekat dengan pelanggan sehingga mereka saling mempercayai.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Wiyarni tersebut adalah terkait pembahasan akuntansi bagi usaha mikro dan kecil. Namun terdapat beberapa perbedaan, yaitu: 1) penelitian tersebut tidak membahas keterkaitan dengan organisasi pengelola ZIS, dan 2) akuntansi dalam pembahasan penelitian tersebut tidak dalam bingkai pemberdayaan

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan sifat dari penelitian ini mengandalkan peneliti sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data, dan dilakukan pada kondisi objek yang alamiah dengan interaksi berkelanjutan, serta fokus pada perspektif partisipan, beragam pandangan dan pemaknaan mereka. Menurut Sugiyono (2015b:16) penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Menurut Sarwono (2006:194-195) penelitian kualitatif dapat dilakukan jika peneliti memiliki tujuan antara lain: a) memahami makna yang melandasi tingkah laku partisipan, b) mendeskripsikan latar dan interaksi partisipan, c) melakukan eksplorasi untuk mengidentifikasi informasi baru, d) memahami keadaan yang terbatas dan ingin mengetahui secara mendalam dan rinci, e) mendeskripsikan fenomena untuk menciptakan teori baru, f) memfokuskan pada interaksi manusia dan proses yang mereka gunakan.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case study*) dengan tujuan eksploratif. Penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan sumber informasi majemuk dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus (Creswell, 2015:135-136). Penelitian dengan tujuan eksploratif biasanya terjadi ketika peneliti hendak menguji minat baru (*new interest*) atau ketika subjek penelitiannya itu relatif baru (*relatively new*). Penelitian eksploratif biasanya dilakukan untuk tiga tujuan, yaitu: a) untuk memuaskan rasa keingintahuan peneliti, b) untuk menguji adanya kemungkinan dilakukannya penelitian yang lebih ekstensif, dan c) untuk mengembangkan

metode untuk dilakukan pada penelitian berikutnya. Pendekatan studi kasus eksploratif digunakan karena dalam penelitian ini dilatarbelakangi keingintahuan peneliti tentang model informasi akuntansi yang diterapkan dalam proses pemberdayaan dan sejauh pengetahuan peneliti belum ada penelitian yang membahas proses pemberdayaan yang menggunakan informasi akuntansi yang baik (Babbie, 2014:90).

3.3 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus eksploratif, maka penjelasan mengenai lokasi penelitian perlu disajikan. Wilayah kajian studi kasus terbatas pada wilayah yang sempit karena merupakan telaah terhadap perilaku pada tingkat individu, kelompok, lembaga dan organisasi. Dengan keterbatasan kasus, lokasi dan waktu, maka penelitian dengan pendekatan studi kasus tidak dimaksudkan untuk menarik kesimpulan secara umum atau melakukan generalisasi, oleh karena itu tidak memerlukan populasi dan sampel. Namun, temuan dari penelitian studi kasus dapat berlaku juga di tempat lain (transferabilitas) jika ciri-ciri dan kondisinya sama atau mirip dengan tempat di mana penelitian dilakukan.

Penelitian ini dilakukan pada sebuah organisasi pengelola dana zakat infaq dan sedekah yang bergerak dalam penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS termasuk pemberdayaan masyarakat miskin, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berlokasi di DKI Jakarta. Pemilihan lokasi penelitian ini dilatarbelakangi oleh informasi bahwa dalam aktivitas pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS belakangan ini juga sudah memanfaatkan akuntansi, yaitu mengajarkan dan mempraktikkan akuntansi untuk masyarakat yang diberdayakan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga non-struktural yang berfungsi untuk pengelolaan zakat dalam skala nasional yang dibentuk oleh pemerintah, bersifat mandiri dan bertanggung jawab pada presiden melalui menteri.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Untuk dapat membaca data kualitatif maka data disajikan dalam bentuk narasi secara rinci dan jelas sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana model informasi akuntansi yang diterapkan oleh BAZNAS kepada para mustahik yang diberdayakan sehingga dapat dilakukan analisis terhadap model informasi akuntansi tersebut terkait proses pemberdayaan masyarakat miskin. Sugiyono (2015b:7) menyatakan bahwa data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Jenis data yang diutamakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif seperti pernyataan dari informan, kegiatan nyata informan, dan foto-foto terkait dalam lapangan dengan argumentasi bahwa penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif. Informan dalam penelitian ini adalah para karyawan/staf di BAZNAS dan juga mustahik yang telah mengalami proses pemberdayaan. Sedangkan data kuantitatif digunakan sebagai pelengkap untuk pendukung agar dapat lebih meyakinkan penjelasan yang ada kaitannya dengan substansi penelitian, seperti gambaran tentang jumlah anggota masyarakat yang diberdayakan, tingkat pendidikan, pendapatan dan pengeluaran rutin perbulan dan laporan keuangan sederhana yang disusun oleh anggota.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah individu-individu yang menjadi informan yang diwawancarai dan objek-objek yang diobservasi langsung. Dalam hal ini sumber data primer adalah karyawan/staf di BAZNAS, baik yang berada di bagian *back office* atau yang di lapangan, dan para anggota masyarakat yang diberdayakan. Dengan kata lain data primer adalah data yang diperoleh melalui

wawancara kepada informan dan pengawasan terhadap objek terkait dalam penelitian. Dengan demikian data primer bisa berupa narasi hasil wawancara, foto, gambar, dan angka-angka hasil observasi langsung. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumentasi dan arsip yang bisa didapat dari sejumlah tempat, kantor dan lembaga di lapangan penelitian. Data sekunder dapat menjadi pendukung pemahaman terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

3.5 Teknik Penentuan Informan

Informan ditentukan dengan cara *purposefully selected participants* yaitu dengan memilih informan yang akan diwawancarai sesuai dengan tingkat pengetahuannya terhadap objek penelitian. Cara semacam ini tidak membutuhkan teknik *random sampling* atau pemilihan partisipan dalam jumlah yang banyak sebagaimana sering dijumpai dalam penelitian kuantitatif. Penentuan informan di dalam penelitian ini tidak didasarkan pada rumusan statistik tetapi lebih pada pertimbangan subyektif peneliti berdasar pada jangkauan dan kedalaman masalah yang akan diteliti dengan tujuan mempelajari karakteristik yang diteliti baik itu individu atau kelompok sehingga hasil dari penelitian ini hanya menunjuk pada individu atau kelompok yang diteliti. Dengan demikian yang menjadi acuan dalam penentuan informan di sini tidak bergantung pada kuantitas tetapi pada kualitas orang yang akan diteliti, sedangkan jumlah informan tergantung pada cakupan masalah yang akan diteliti. Informan dalam penelitian ini setidaknya berasal dari dua kelompok, yaitu: a) kelompok karyawan/staf di BAZNAS, b) kelompok anggota yang diberdayakan

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul terdiri dari data primer dan data sekunder. Smith (2003:135) menyatakan bahwa studi kasus normalnya akan mengumpulkan data dari beberapa sumber, antara lain:

bukti dokumenter, data wawancara, observasi langsung dan observasi berpartisipasi.

3.6.1 Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang dilakukan (Sarwono, 2006:224). Sanafah Faisal (1990) dalam Sugiyono (2015a:310) mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi (*participant observation*), observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation* dan *covert observation*), dan observasi yang tak berstruktur (*unstructured observation*). Bentuk observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi terus terang atau tersamar (*overt observation* dan *covert observation*).

Dalam observasi terus terang atau tersamar, peneliti ketika dalam proses pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data (informan) bahwa ia sedang melakukan pengumpulan data untuk penelitiannya. Sehingga para informan mengetahui sejak awal sampai akhir mengenai aktivitas peneliti. Tetapi di saat tertentu peneliti juga tidak terus terang atau samar-samar dalam observasi, hal ini untuk menghindari adanya data yang dibutuhkan peneliti yang dirahasiakan oleh informan jika peneliti melakukan observasi dengan terus terang.

3.6.2 Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih yang tidak mudah didapatkan jika hanya dengan cara observasi. Wawancara dapat digunakan dalam tahap studi pendahuluan dan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden. Interview merupakan teknik pengumpulan data yang merupakan inti dari penelitian kualitatif. Sering kali observasi dalam sebuah penelitian disertai juga dengan wawancara mendalam. Begitu pula dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dalam tahap yang tidak berbeda dengan

pelaksanaan observasi. Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015a:317) “*interviewing is at the heart of social research. If you look through almost any sociological journal, you will find that much social research is based on interview, either standardized or more in-depth*”. Wawancara merupakan hatinya penelitian sosial. Bila anda melihat jurnal dalam ilmu sosial, maka anda akan menemukan bahwa banyak penelitian sosial berdasar pada wawancara, baik yang standar atau yang lebih mendalam.

Bentuk wawancara yang akan digunakan dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dalam bentuk semiterstruktur. Wawancara dalam penelitian dikategorikan menjadi tiga bentuk, yaitu: wawancara terstruktur (*structured interview*), wawancara semiterstruktur (*semistructured interview*) dan wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*) (Smith, 2003:128). Adapun penjelasan mengenai tiga bentuk wawancara tersebut, yaitu bahwa wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan menyediakan pertanyaan dan perintah yang perlu dijawab oleh responden yang disajikan oleh peneliti, pada umumnya pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan tertutup. Maksud pertanyaan tertutup di sini adalah pertanyaan yang jawabannya telah disediakan oleh peneliti, sehingga responden menjawab dengan memilih jawaban yang disediakan. Pertanyaan tidak melebar melebihi pertanyaan yang telah disediakan. Sedangkan wawancara semiterstruktur juga menyediakan pertanyaan namun peneliti masih dapat melakukan pengembangan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan terkait dengan masalah yang diteliti. Dan wawancara tidak terstruktur tidak memiliki pertanyaan spesifik, pertanyaan dapat berkembang dan melebar namun tetap bertujuan pada topik tertentu.

3.6.3 Dokumen

Dokumen adalah data yang tersimpan mengenai peristiwa yang telah lalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang. Dokumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen terkait anggota yang diberdayakan, baik berupa foto, bagan-bagan, dan catatan seperti

catatan keuangan atau laporan keuangan. Studi dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Hasil dari pengumpulan data dengan observasi dan wawancara akan lebih dapat dipercaya dengan adanya dokumentasi.

3.7 Teknik Analisa Data

Sugiyono (2015a:334) mengutip model analisis data Miles dan Huberman menyatakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Gambarannya adalah ketika terjadi pengumpulan data dengan wawancara, ketika peneliti mendapatkan jawaban dari responden/informan maka akan menganalisis jawaban tersebut dan jika dinilai kurang memuaskan maka peneliti akan mengajukan pertanyaan lanjutan sampai tahap tertentu sehingga didapatkan jawaban yang kredibel.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan konsep Miles dan Huberman dimana analisis data dilakukan secara interkatif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu:

- a. *Data collection* yaitu tahapan pengumpulan data dari sumber data dengan metode wawancara, observasi dan studi dokumen
- b. *Data reduction* yaitu tahapan pemilahan data yang penting dan menyisihkan data yang tidak dibutuhkan. Data yang didapatkan di lapangan sangat banyak sehingga peneliti dituntut untuk mencatat dengan teliti, merangkum dan memilah data-data yang dinilai penting dan dibutuhkan kemudian membuang data yang tidak dibutuhkan.
- c. *Data display* yaitu tahapan dimana data yang telah mengalami reduksi ditampilkan dalam bentuk narasi atau uraian singkat, bagan, tabel dan semacamnya.
- d. *Conclusion drawing/ verification* yaitu tahapan pengambilan simpulan dan verifikasi yang merupakan tahap akhir dari penelitian.

3.8 Pengujian Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2015a:364) pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Uji *Credibility* atau uji kredibilitas data dapat dilakukan dengan beberapa tindakan, antara lain: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi, analisis kasus negatif, dan *member check*. Dalam penelitian ini berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti maka uji kredibilitas data dilakukan dengan peningkatan ketekunan, bahan referensi dan triangulasi teknik. Peningkatan ketekunan berarti peneliti dalam mengumpulkan data telah memastikan bahwa telah melalui pengamatan dengan seksama, teliti, dan mendalam. Menggunakan bahan referensi berarti peneliti melakukan penguatan keyakinan terhadap keabsahan data dengan melihat referensi dengan topik pembahasan yang searah. Sedangkan triangulasi teknik berarti peneliti memastikan keabsahan data dengan membandingkan antar data yang didapat dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumen.
- b. Uji *transferability* adalah menguji kemampuan hasil penelitian untuk diterapkan di kondisi dan lingkungan sosial yang lain. Untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dinilai oleh pembaca apakah dapat diterapkan di tempat lain atau tidak, maka peneliti menyajikan laporan penelitian dengan memberikan uraian rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya.
- c. Uji *dependability* atau uji reliabilitas adalah memastikan bahwa proses penelitian dapat diulangi/direplikasi oleh orang lain. Untuk mencapai hal tersebut maka peneliti harus dapat menjelaskan tentang rincian proses penelitian ketika ditanyakan terkait aktivitas penelitiannya mulai bagaimana menentukan masalah, memasuki lapangan, menentukan sumber data, sampai membuat kesimpulan.
- d. Uji *confirmability* atau uji obyektivitas adalah memastikan bahwa hasil penelitian dapat disepakati oleh banyak orang. Pengujian *confirmability*

dilalui satu proses dengan uji *dependability*, karena ketika telah lulus dalam tahap uji *dependability* maka dapat dikatakan penelitian ini adalah obyektif.



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan pada organisasi pengelola dana Zakat, Infaq, dan Sedekah yaitu pada salah satu program pemberdayaan BAZNAS Pusat yang diberi nama Zmart. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa model informasi akuntansi mustahik yang berjalan dalam proses pemberdayaan mustahik produktif dan mendesain model informasi akuntansi yang baik untuk diterapkan dalam proses tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pemberdayaan mustahik produktif BAZNAS Pusat melalui LPEM dengan program Zmart menerapkan pendampingan langsung kepada mustahik dan mengharuskan mustahik memberikan pelaporan setiap pekan. Laporan yang disajikan oleh mustahik hanya berupa laporan omzet harian sederhana yang dicatat berdasarkan jumlah uang yang dihasilkan setiap harinya. Pencatatan yang dilakukan selain omzet harian adalah pencatatan pelanggan yang membeli barang tidak secara tunai (piutang), namun menurut penuturan ibu Eka Subiarti (salah seorang mustahik produktif program Zmart) bahwa catatan tersebut untuk pegangan pribadi dan tidak dilaporkan kepada pendamping.

Proses pemberdayaan mustahik dengan pendampingan yang intens memang dirasakan telah membawa kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi mustahik sebagaimana diakui oleh para mustahik dan mereka berharap pendampingan terus dilaksanakan hingga mereka sukses. Namun, pencapaian mereka tentu tidak terukur dengan baik. Hal ini dikarenakan indikator kemajuan mereka hanya berdasarkan perbandingan nilai omzet, sedangkan peningkatan omzet tidak selalu menandakan peningkatan laba usaha dan selanjutnya peningkatan modal usaha. Penerapan laporan omzet ini dengan pertimbangan lemahnya kemampuan mustahik dalam menyusun laporan keuangan. Oleh karena itu peneliti telah mendesain model informasi akuntansi yang mudah untuk diterapkan oleh para mustahik namun mampu menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Pentingnya pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar (dalam hal ini adalah SAK EMKM) adalah manfaat yang akan

dirasakan oleh para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. BAZNAS selaku penyalur dana ZIS juga akan terbantu dalam menentukan indikator kemajuan usaha mustahik. Bahkan manfaat untuk mustahik ke depannya adalah dapat menghilangkan hambatan administratif untuk bisa mengakses jasa keuangan.

5.2 Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Pusat dalam program pemberdayaannya juga sudah menerapkan informasi akuntansi bagi mustahik, namun penerapannya hanya berupa laporan omzet. Rendahnya literasi keuangan mustahik menjadi pertimbangan dalam penerapan informasi akuntansi dengan bentuk laporan omzet yang hanya berdasarkan pada jumlah uang yang tersedia dan sudah dipisahkan berdasarkan jenis pendapatannya. Jenis pendapatan dalam laporan omzet tersebut adalah retail (untuk persediaan berupa sembako), non retail (untuk persediaan selain sembako), dan PPOB (untuk produk jasa penjualan pulsa dan sebagainya). Maka untuk meningkatkan kualitas informasi akuntansi, peneliti mendesain model informasi akuntansi yang mengacu pada SAK EMKM namun juga memperhatikan kemampuan mustahik untuk mengaplikasikannya.

Penelitian ini berimplikasi pada tataran teoritis dan praktis. Implikasi dalam tataran teoritis penelitian ini telah mengungkapkan bahwa informasi akuntansi yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan ekonomis. Sedangkan dalam tataran praktis penelitian ini telah menghasilkan desain model informasi akuntansi *single-entry* integratif yang mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan panduan SAK EMKM.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan secara teknis dalam pelaksanaannya. Keterbatasan pertama adalah dalam proses pengumpulan data. Peneliti terhambat oleh kondisi nasional yang sedang dilanda pandemi Covid-19

sehingga pengumpulan data dilakukan melalui media komunikasi elektronik (telepon dan pesan melalui aplikasi Whatsapp). Pengumpulan data dengan metode tersebut sangat tergantung pada waktu luang yang dimiliki responden untuk bisa memberikan respon yang cepat. Dampak dari pandemi ini juga membatasi peneliti untuk berkomunikasi personal secara lebih dekat dengan responden, sehingga informasi yang didapatkan bisa lebih mendalam. Keterbatasan yang kedua adalah keterbatasan kemampuan peneliti di dalam menangkap dan mengungkap fenomena yang lebih dalam di lapangan penelitian. Keterbatasan yang ketiga adalah keterbatasan secara teori yang mampu lebih dalam mendukung penelitian yang sedang dilaksanakan oleh peneliti.

5.4 Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah disajikan maka saran yang dapat disampaikan oleh peneliti kepada pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian ini, khususnya para peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian yang lebih mendalam, baik dari segi pengumpulan data ataupun dari analisa. Bahkan jika objek penelitian bisa dilakukan kepada posisi yang lebih luas lagi cakupannya, misalnya diarahkan pada semua program pemberdayaan yang ada di BAZNAS atau di organisasi atau lembaga yang memiliki visi yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqallani, Ibnu Hajar. 1986. *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*. Kairo: Dar ar-Rayyan li at-Turats.
- Al-Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz. 2018. *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrat al-Ain bi Muhimmati ad-Din*. Madura: Gerbang Andalus.
- As-Shan'ani, Ismail al-Kahlani. 2000. *Subulus Salam Syarh Bulugh al-Maram*. KSA: Dar Ibn al-Jauzi.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 1985. *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Daar al-Fikri.
- Babbie, Earl. 2014. *The Practice of Social Research, Fourteenth Edition*. USA: Cengage Learning
- Beik, Irfan S. dan L.D.Arsyianti. 2013. *Optimization of Zakat Instrument in Indonesia's Poverty Alleviation Programme*. SEADI Project.
- Bertisch, A.M. 1994. *Personal Finance*. California: Harcourt Braceand Company.
- Creswell, John W. 2013. *Qualitative Inquiry and Research Design; Choosing Among Five Approaches*. 3rd Edition. London: SAGE. Terjemahan oleh Ahmad Lintang Lazuardi. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih di antara Lima Pendekatan (Edisi Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Das, Kamal Kanti. 2016. *Micro-Finance and Women Empowerment*. Intercontinental Journal of Finance Research Review. Vol.4, Issue.2: 21 – 26.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1990. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Penerbit Mahkota.
- Dzakiroh, Husna. dan Wulandari, Ries. 2019. *Do Islamic Microfinance Practise Decrease the Level of Three Aspect of Poverty?*. Iqtishadia Vol. 12 (1), pp. 87-100.
- Ediraras, Dharma T. 2010. *Akuntansi dan Kinerja UKM*. Jurnal Ekonomi Bisnis No.2 volume 15: 152 – 158.
- Eisenhardt, K.M. 1989. *Agency Theory; an assessment and review*. Academy of Management Review, 14: 57-74.
- Erlina. O.S, Rambe. dan Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual, Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 dan Peremendagri No.64 Tahun 2013*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Essa, Samy A.G., H.C. Dekker, Tom L.C.M Groot. 2018. *Your Gain My Pain? The Effects of Accounting Information in Uncertain Negotiation*, Management Accounting Research Vol.41:20-42.
- Feies, Gheorghe C., C Feies, D Mates, D Cotlet. 2013. *The Role of Accounting Information Within the Management Process of Public Utilities Services*. Procedia-Social and Behavioral Sciences 83: 711-716.

- Florina, Salisteanu Simona dan Ecaterina, Oros Oliver. 2015. *Aspect Regarding The Use of Modeling in Accounting*, *Procedia Economics and Finance*, 26, 272 – 277.
- Gordon, D. 2005. *Indicator of Poverty and Hunger*. http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/ydiDavidGordon_poverty.pdf. diakses pada 20 April 2018.
- [Gray](#), R. [Dey](#), C. [Owen](#), D. [Evans](#), R. [Zadek](#), S. 1997. *Struggling with the praxis of social accounting: Stakeholders, accountability, audits and procedures*. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 10 Issue: 3, pp.325-364.
- Gray, A. dan Bill, J. 1993. *Codes of accountability in the new public sector*. *Accounting, Auditing, and Accountability Journal* 6 (3): 52-67.
- Haughton, Jonathan dan S.R.Khandker. 2009. *Handbook on Poverty and Inequality*. Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.
- Hermawati, Istiana. 2017. *Pengukuran Konstrak Kemiskinan di Indonesia (The Measurement of Poverty Construct in Indonesia)*. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 41, No.3 : 269-284.
- Hira, Tahira K. 2009. *Personal Finance: Past, Present and Future*, Networks Financial Institute Policy Brief.
- Huefner, Ronald J., J.A. Largay III. 2008. *The Role of Accounting Information in Revenue Management*, *Business Horizons* 51: 245-255.

- Ibnu Qosim, Muhammad. 2018. *Fathu al-Qorib al-Mujib*. Madura: Gerbang Andalus.
- Jensen, M.C. dan William, H Meckling. 1976. *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics 3: 305-360.
- Kieso, Donald E. J.J. Weygandt. dan T.D. Warfield. 2011. *Intermediate Accounting*. Volume 1 IFRS Edition. USA: John Wiley and Sons Inc. Terjemahan oleh Nia Pramita Sari dan Muhammad Rifai. 2017. *Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate Accounting)*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Kurniawati, Dwi P., B. Supriyono dan I. Hanafi. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1, No.4 : 9 -14.
- Martani, Dwi, S.V. Siregar, R. Wardhani, A. Farahmita dan E. Tanujaya. 2017. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK Edisi 2*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Miqdad, Muhammad. 2012. *Praktik Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) dan Usefulness Informasi Akuntansi (Telaah Teoritis dan Empiris)*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol.14, No.2: 147-155.
- Narsa, I Made, A. Widodo dan S. Kurnianto. 2012. *Mengungkap kesiapan UMKM dalam implementasi standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (PSAK-ETAP) untuk meningkatkan akses modal perbankan*. Majalah Ekonomi, No.3: 204-2014.

Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2017. *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Otoritas Jasa Keuangan. 2017. *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017)*.

Pratama, Yoghi Citra. 2015. *Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)*. The Journal Tauhidinomics, Vol.1, No.1: 93-104.

Rewilak, Johan. 2017. *The Role of Financial Development in Poverty Reduction*. Review of Development Finance 7: 169-176.

Saad, Ram Al Jaffri, N.M. Abdul Aziz dan N. Sawandi. 2014. *Islamic Accountability Framework in The Zakat Funds Management*. Procedia – Social and Behavioral Sciences 164: 508-515.

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Schuchardt, Jane, D.C. Bagwell, W.C. Bailey, S.A. DeVaney, J.E. Grable, I.E. Leech, J.M. Lown, D.L. Sharpe dan Jing J. Xiao. 2007. *Personal Finance: An Interdisciplinary Profession*. Journal of Financial Counseling and Planning, Vol. 18, No. 1: 61 – 69.

Smith, Malcolm. 2003. *Research Methods in Accounting*. London: Sage Publication.

Sobaya, Soya, M.F. Hidayanto dan J. Safitri. 2016. *Pengaruh Literasi Keuangan dan Lingkungan Sosial Terhadap Perencanaan Keuangan Pegawai di*

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Madania Vol.20, No.1 : 115 – 128.

Steelyana, Evi. 2013. *Perempuan dan Perbankan: sebuah tinjauan tentang peran inklusi keuangan terhadap pengusaha UMKM perempuan di Indonesia*. Journal The Winners, Vol. 14 No. 2 : 95 – 103.

Strom, K. 2000. *Delegation and Accountability in Paliementary Democracies*. European Journal of Political Research, 37: 261-289.

Sugiyono. 2015a. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sugiyono. 2015b. *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R&D)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemiteraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Suwardjono. 2014. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan (edisi ketiga)*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.

Tam N.T.T., Vy N.T.T., My H.H. 2019. *Factors Influencing to Accounting Information Quality: A Study of Affecting Level and Difference Between in Perception of Importance and Actual Performance Level in Small Medium Enterprises in Ho Chi Minh City*. ECONVN 2019: Beyond Traditional Probabilistic Methods in Economics, Vol. 809, pp. 999 – 1015.

Tampubolon, Joyakin, B.S. Sugihen, M. Samet, Dj. Susanto dan Sumardjo. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendekatan Kelompok (Kasus*

Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)). Jurnal Penyuluhan. Vol.2 No.2 : 10 – 22.

Ummah, Bintan B., N. Nuryantono dan L. Anggraeni. 2015. *Analisis Inklusi Keuangan dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia.* Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Vol. 4 No. 1 : 1 – 27.

[Velayutham](#), S. [Perera](#), M.H.B. 2004. *The influence of emotions and culture on accountability and governance.* Corporate Governance: The international journal of business in society, Vol. 4 Issue: 1, pp.52-64.

Warren, Carl S. J.M. Reeve.J.E. Duchac. E.T. Wahyuni. dan A.A. Jusuf. 2017. *Accounting – Indonesia Adaptation.* 4th Edition. Singapore: Cengage Learning Asia Pte Ltd. Terjemahan oleh tim editor Penerbit Salemba. 2017.*Pengantar Akuntansi 1 Adaptasi Indonesia (Edisi 4).* Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Weygandt, Jerry J. D.E. Kieso. dan W.G. Kell. 1995. *Accounting Principles 4th Edition.* USA: John Wiley & Sons Inc.

Wiyarni. 2017. *Traditional Market Accounting: Management or Financial Accounting.* Asian Journal of Accounting Research. Vol.2, Issue.1: 7 – 10.

Yulinartati, A. Roziq dan L.A.F. Ekaningsih. (2013). *Three Circles Model Revitalisasi Lembaga Pengelola Zakat.* INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. Vol.7, No.2 : 387 – 408.